



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

EDISI JANUARI-APRIL 2025

# GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

Antara  
Hilirisasi  
dan PSN:  
Di Mana Hak  
Masyarakat  
Adat ?



## MASYARAKAT ADAT DI PUSARAN PROYEK RAKSASA

Dari Barat  
ke Timur:  
*Food Estate*  
Mengancam  
Sumber Pangan  
Masyarakat Adat





## Susunan Redaksi

### **Penanggung Jawab**

Sekretaris Jenderal AMAN  
Rukka Sombolingga

### **Pimpinan Umum**

Deputi I Sekjen AMAN  
Urusan Organisasi  
Eustobio R. Renggi

### **Pimpinan Redaksi**

Direktur Infokom PB AMAN,  
Titik Pangestu

### **Redaktur Pelaksana**

Wulan Putri

### **Kepala AMAN Newsroom**

Apriyadi Gunawan

### **Redaktur Bahasa**

Muamar Fikrie

### **Desain & Tata Letak**

Taqi

### **Koordinator Foto**

Giat Perwangsa

### **Redaksi & Kontributor**

Maruli Simanjuntak (JMA dari Tano Batak), Nesta Makuba (JMA dari Jayapura, Papua), Nuskan Syarif (JMA dari Indragiri Hulu, Riau), Hairuddin Alexander (Kader AMAN Kaltim), Marolop Manalu Gorga (Staf Urusan Pendidikan dan Kebudayaan PB AMAN), Hero Aprila (PJ Ketua Umum BPAN).

### **Distribusi**

Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

### **Alamat Redaksi**

Rumah AMAN  
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820  
☎ (021) 829 7954/837 06282  
✉ rumahaman@cbn.net.id

### **Media Sosial**

@AliansiMasyarakatAdatNusantara  
 @RumahAMAN  
 @rumah.aman  
 AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

### **Podcast Radio Gaung AMAN**

www.radio.aman.or.id  
 "Radio Gaung AMAN"

### **Portal Berita AMAN.or.id**

AMAN.or.id





33



**Sekjen AMAN Kunjungan ke Wilayah Adat Comboios Brazil: Perkuat Spirit Perjuangan Masyarakat Adat**

22



26



30



**International Women's Day 2025: Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Jalan Keluar Memastikan Ruang Penghidupan Perempuan Adat**

35



**Kedang Ipil: Tuan Rumah Rakernas AMAN VIII**

42



**Sona: Perempuan Adat Talang Mamak yang Menuntut Keadilan**



# Meneguhkan Resistensi, Menguatkan Solidaritas dalam Kepungan Pembangunan yang Merusak

Oleh : Rukka Sombolingga,  
Sekretaris Jenderal AMAN.

**S**ejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekadar mengulang mantra modernisasi ala rezim Jokowi: pembangunan dan investasi.

Padahal, dalam satu dekade terakhir, atas nama pembangunan dan investasi, telah terjadi 687 konflik agraria yang mengancam 11,07 juta hektare wilayah adat. Pun sebanyak 925 Masyarakat Adat menjadi korban kriminalisasi, 60 orang mengalami kekerasan, dan satu orang meregang nyawa.

Singkatnya, pembangunan dan investasi ala pemerintah justru menjauhkan negara dari isu-isu substantif: pemenuhan hak Masyarakat Adat, perlindungan hutan, dan keberlanjutan lingkungan.

Alhasil, pemerintahan Prabowo-Gibran terdengar seperti radio lawas dengan sinyal buruk. Pengumuman daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diteken Prabowo jadi salah satu sinyalnya. Daftar panjang proyek-proyek mercusuar itu, misalnya, masih menempatkan *food estate* menjadi prioritas utama.

Proyek lumbung pangan nasional ini selama hampir satu dekade banyak meninggalkan masalah. Hutan dibabat habis, kayunya pun raib. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kegagalan tanam singkong malah ditambal dengan menanam jagung dalam polybag. Belum lagi perampasan wilayah adat, seperti dalam proyek perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan.





Prabowo-Gibran juga masih menempatkan hilirisasi nikel sebagai prioritas. Proyek ini justru menggusur dan mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat, seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Dalam irama sumbang yang sama, mimpi menghadirkan "energi baru dan terbarukan" ternyata tak lebih dari ilusi—untuk tidak menyebutnya sebagai tipu-tipu. Proyek geothermal, misalnya, telah merampas hak-hak Masyarakat Adat Poco Leok di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) berbahan bakar kayu oleh Medco Group mengabaikan hak Orang Marind di Merauke, Papua Selatan.

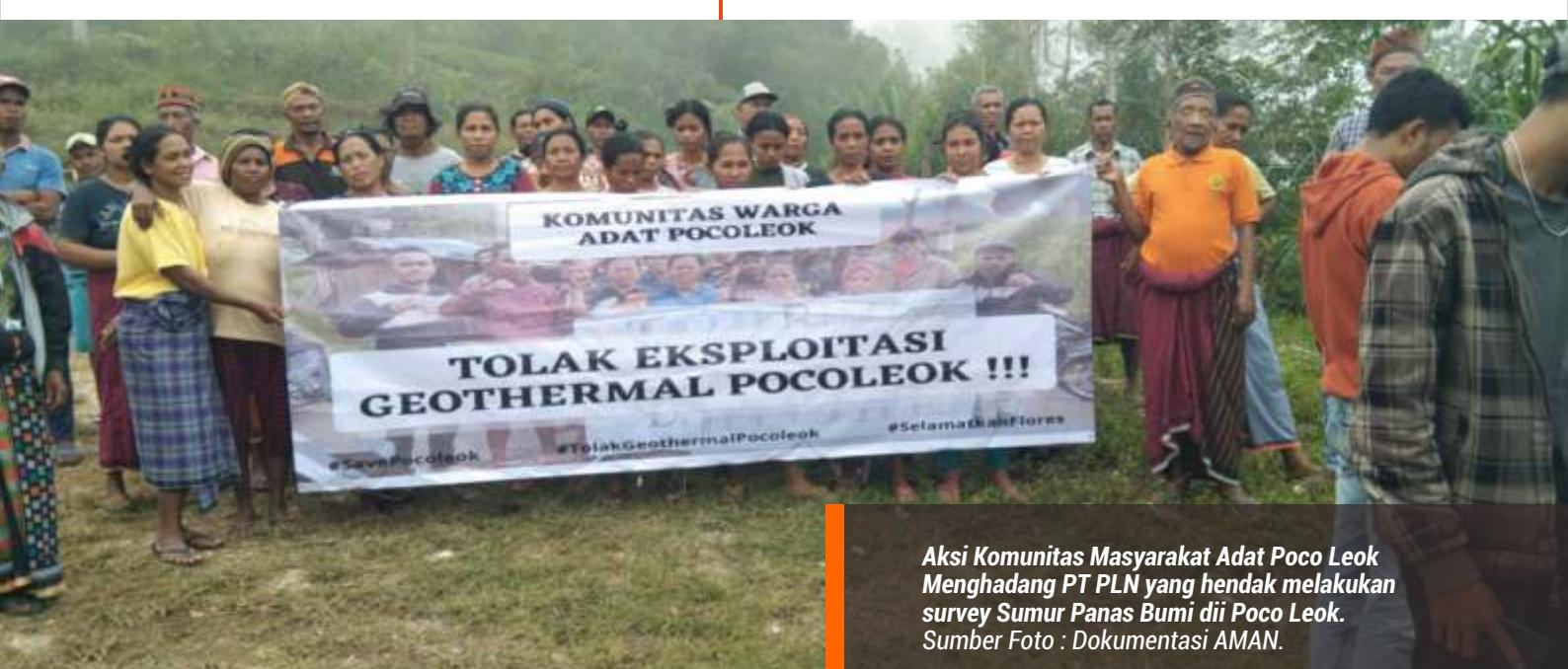
Ambisi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tetap dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. Pada awal 2025, proyek ini menyebabkan banjir yang menimpa Komunitas Masyarakat Adat Suku Balik di Sepaku. Secara keseluruhan, ada 51 komunitas adat yang terancam akibat ambisi pemindahan ibu kota ini.

Lebih dari itu, dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Prabowo-Gibran tidak mencantumkan satu pun program prioritas terkait Masyarakat Adat. Ini menunjukkan bahwa praktik kolonialisme atas nama pembangunan dan investasi masih akan terus berlanjut.

Praktik kolonialisme itu juga sangat mungkin dibarengi dengan kekerasan. Terutama dengan pengesahan revisi UU TNI yang akan memperkuat praktik dwifungsi tentara. Tentara akan segera kembali ke teater politik nasional dan panggung represi. Seolah tinggal tunggu waktu, Masyarakat Adat akan semakin sering berhadapan dengan ancaman kekerasan dan kriminalisasi.

Nihilnya komitmen pemerintahan terhadap pemenuhan hak Masyarakat Adat dan perlindungan hutan juga terdengar dalam retorika mereka.

Lewat kata-katanya sendiri, Prabowo bahkan menyamaratakan sawit dengan tanaman hutan. Belum genap 100 hari berkuasa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah mewacanakan alih fungsi 20 juta hektare lahan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melempar wacana agar Indonesia mengikuti jejak Amerika Serikatnya Donald Trump untuk menarik diri dari komitmen iklim global, Paris Agreement.



**Aksi Komunitas Masyarakat Adat Poco Leok Menghadang PT PLN yang hendak melakukan survey Sumur Panas Bumi di Poco Leok.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Lantas, bagaimana nasib Masyarakat Adat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran? Saya tegaskan: Pesimisme adalah barang mewah bagi kita. Tidak ada ruang untuk berkecil hati, apalagi mundur. Sebaliknya, dengan hati yang lapang, kita harus terus maju.

Secuil harapan muncul saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada November 2024. Betapapun kecilnya harapan itu, kita harus tetap berdiri tegak untuk memastikan pengesahannya sebagai sebuah produk Undang-Undang, yang mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat dan memberi perlindungan atas wilayah adat.

Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat inilah palagan kita. Kita harus punya optimisme untuk bisa memenangkan pertarungan ini; dan perjalanan sejarah telah menempa daya tahan kita, Masyarakat Adat, sebagai penyintas. Kita telah bertahan dari berbagai gelombang penghancuran dan invasi: mulai dari kerajaan dan kesultanan, para pedagang, kolonialisme Eropa, pendudukan Jepang, hingga berbagai rezim pasca-kemerdekaan.

Dalam setiap tekanan, hak kita atas wilayah adat tetap abadi. Jika kini kita kembali dijajah oleh kekuatan dari luar wilayah adat, maka kita harus melipatgandakan daya tahan.

Jika di masa lampau kita bertempur dengan panah, tombak, dan parang, maka hari ini senjata kita adalah organisasi. Kita harus memperkuat simpul-simpul organisasi, mengasah pisau analisis, mencetak lebih banyak kader, dan mengibarkan panji-panji perjuangan kita.

Dalam semangat itu, kita akan menyongsong Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (RAKERNAS AMAN) VIII. Ini bukan sekadar ajang refleksi, tapi juga panggung penyusunan strategi dan taktik untuk menghadapi gempuran pembangunan dan investasi.

Rakernas juga akan menjadi momentum untuk mempererat solidaritas, bukan hanya di antara Masyarakat Adat di Nusantara, tetapi juga dengan kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan.

**Aksi Masyarakat Adat & Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerak Masa menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





# Food Estate: Solusi atau Ancaman bagi Masyarakat Adat

Oleh : Tim Infokom AMAN \*

\* Artikel ini ditulis secara kolaboratif bersama Jurnalis Masyarakat Adat dari Tano Batak dan Papua.



**Ekskavator Milik Jhonlin Group yang diterjunkan untuk membuka hutan demi proyek Food Estate Cetak Sawah di Merauke.**  
Sumber Foto : Gecko Project.

Program *Food Estate* menjadi sorotan. Setelah “gagal” dijalankan pada masa pemerintahan Presiden RI ke 7 Joko Widodo, program tersebut coba kembali dilanjutkan oleh Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo pun memasukkan program *food estate* sebagai bagian dari Asta Cita, dengan target swasembada pangan pada tahun 2027. Masalahnya, program ini justru menimbulkan konflik dengan kebijakan pangan yang sudah ada, seperti program ketahanan pangan berbasis lokal dan perlindungan lahan adat yang selama ini tidak terkoordinasi dan tidak pernah dievaluasi dengan baik.

Program ini, yang sebelumnya telah dijalankan di berbagai wilayah Indonesia, kerap menuai kritik karena lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan solusi terhadap persoalan ketahanan pangan. Berbagai proyek *food estate* di masa lalu, termasuk di Sumatera Utara dan Papua, terbukti gagal mencapai target produksi, merusak ekosistem, serta memicu konflik agraria yang merugikan Masyarakat Adat dan petani lokal. Pola pelaksanaannya juga lebih berpihak pada korporasi dibanding masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait keberpihakannya terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Di Tano Batak, Sumatera Utara misalnya, proyek *food estate* dan Tanaman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) mengancam hutan kemenyan, yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian Masyarakat Adat. Akibatnya, masyarakat di sekitar Danau Toba kehilangan akses terhadap tanah adatnya. Sementara, proyek ini justru lebih menguntungkan korporasi daripada masyarakat setempat.

Ketua Pelaksana Harian AMAN Daerah Humbang Hasundutan, Samuel R. Purba menegaskan pembangunan seharusnya tidak memungkirkan perekonomian masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: hutan adat dibabat, tanah dirampas, dan solusi yang adil tidak pernah diberikan.



**Jokowi & Luhut Binsar Panjaitan meninjau kawasan food estate di Desa Siria-ria, Pollung, Humbang Hasundutan Sumatera Utara.**  
Sumber Foto : Humas Sumut

Proyek *food estate* di Sumatera Utara telah mengubah 60.000 hektar lahan, termasuk wilayah adat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat. Perubahan ini tidak hanya mengancam lanskap alam, tetapi juga keberlangsungan hidup Masyarakat Adat yang bergantung pada hutan dan tanah adat. Namun, alih-alih meningkatkan ketahanan pangan, proyek ini justru memicu konflik agraria baru.

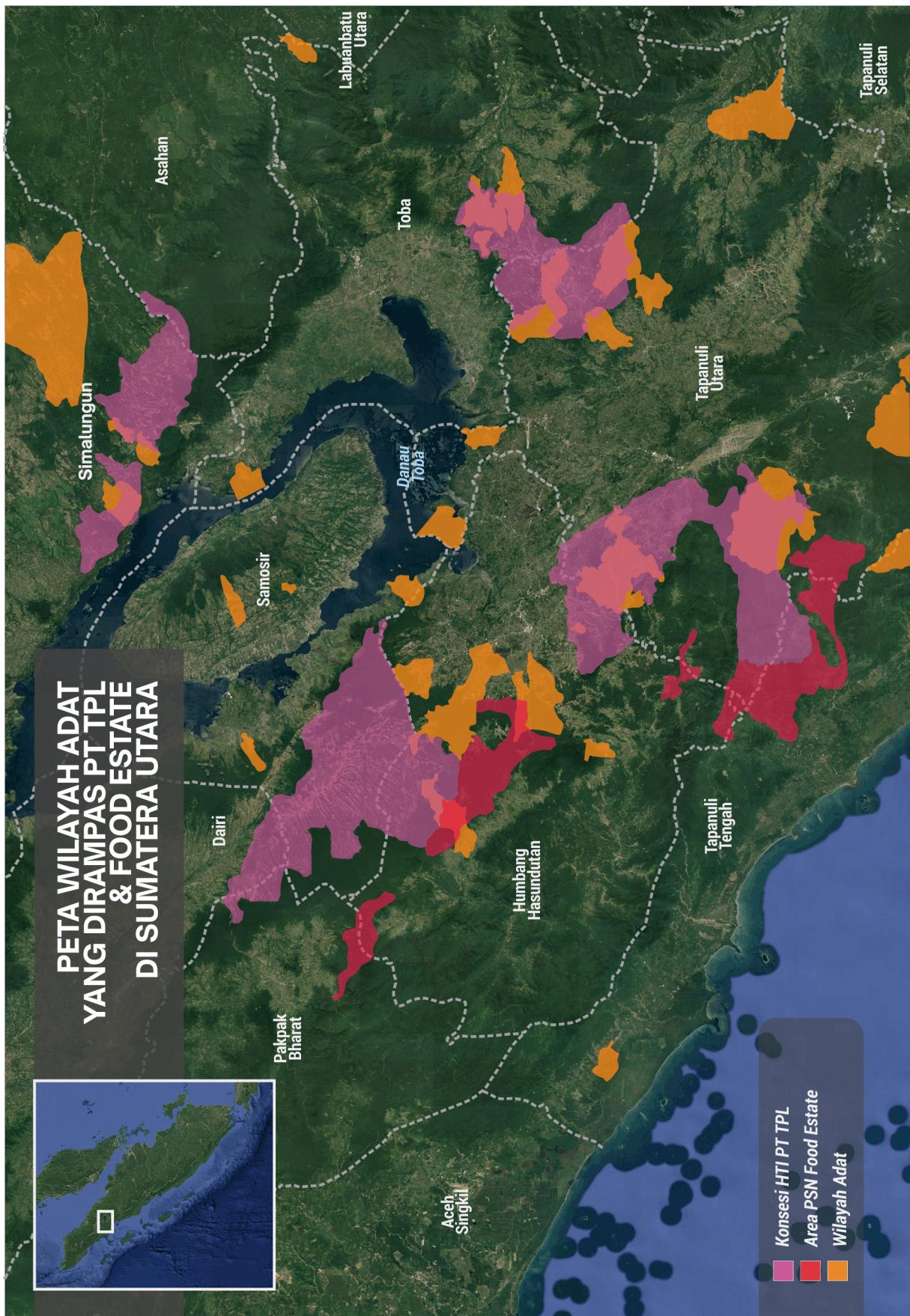
Di Kabupaten Humbang Hasundutan misalnya, dari target 1.000 hektare yang direncanakan, 215 hektare yang telah dibuka telah menimbulkan konflik dengan Masyarakat Adat. Mereka yang sebelumnya berhadapan dan masih bersengketa dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kini harus menghadapi ancaman penggusuran akibat proyek *food estate* ini.

Muhammad Irkham dari Kedeputian III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, juga menyoroti bahwa luas konsesi TPL sendiri mencapai empat kali lipat dari luas *food estate* yang ada di Tano Batak. Fakta ini semakin menambah ketimpangan penguasaan lahan di kawasan tersebut.

Selain ketimpangan, proyek ini juga jelas-jelas lebih menguntungkan korporasi dibandingkan petani lokal. Tujuh perusahaan swasta, termasuk PT Indofood, PT Calbee Wings, dan PT Champ, telah berinvestasi di *Food Estate*. Sementara itu, Masyarakat Adat yang bergantung pada hutan kemenyan justru kehilangan lahan mereka. Kehilangan akses terhadap tanah adat ini berimbas langsung pada kesejahteraan ekonomi Masyarakat Adat, di mana petani kemenyan menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. Kemenyan, yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama petani, semakin sulit diperoleh akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek *food estate*.

"Sudah susah mendapatkan kemenyan sekarang setelah ada *food estate*. Kalau pun ada, kami harus pergi ke hutan adat untuk mengambilnya. Tapi, sedihnya kami harus melapor terlebih dahulu ke posko yang dijaga TNI dengan menunjukkan identitas," ungkap Polmen Munte, petani kemenyan.

Proyek *food estate* juga memicu degradasi lingkungan di sekitar Danau Toba. Deforestasi yang terjadi meningkatkan risiko bencana ekologis seperti tanah longsor, berkurangnya debit air, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi penopang ekosistem lokal. Kawasan yang dahulu subur kini berubah menjadi ladang dengan sistem pertanian monokultur yang tidak berkelanjutan. Tak pelak, situasi ini menyebabkan penurunan kesuburan tanah serta mengancam kelangsungan spesies tumbuhan dan hewan yang sebelumnya hidup di hutan tersebut.





**Ratusan Ekskavator milik Jhonlin masuk menerobos wilayah adat milik Masyarakat Adat Suku Yei untuk dibuka jadi lahan Food Estate cetak sawah.**  
Sumber Foto : Gecko Project.



Dampak proyek *food estate* tidak hanya terjadi di Tano Batak, tetapi juga di Papua. Di Merauke, proyek ini menjadi bagian dari skema *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang sejak awal telah menuai protes. Program ini diluncurkan pada tahun 2010 dengan tujuan menciptakan lumbung pangan nasional, tetapi dalam praktiknya justru merampas lahan Masyarakat Adat. Konversi lahan hutan dan rawa menjadi perkebunan skala besar malah menggeser keberadaan hutan sagu, yang merupakan sumber pangan utama Masyarakat Adat Marind.

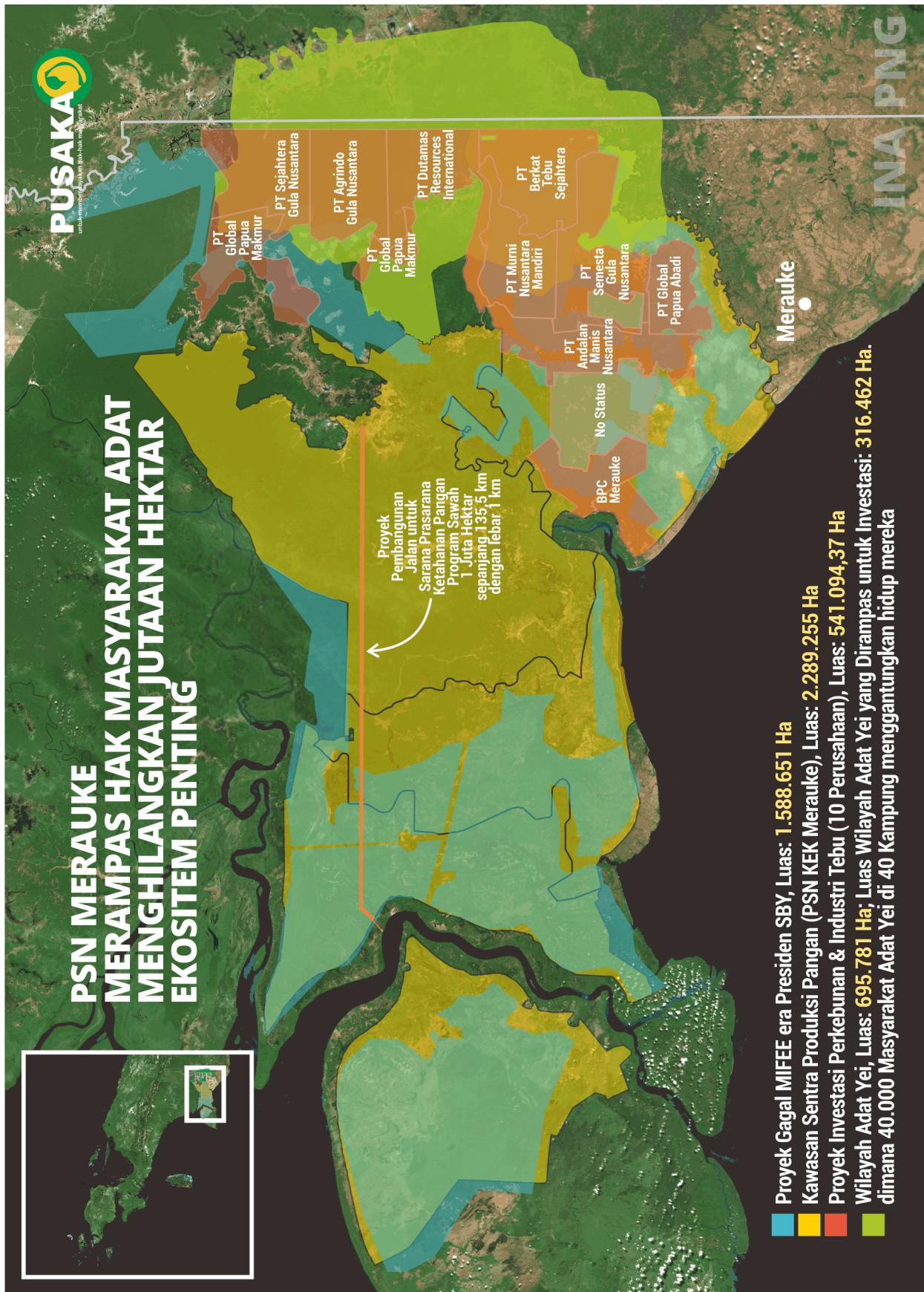
Iren Fatagur dari Kampung Yamara mengungkap belakangan ini banjir sering terjadi di kampung mereka, akibat berkurangnya kawasan rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Sagu yang merupakan makanan pokok mereka juga sulit didapat karena sudah banyak lahan subur yang berubah menjadi ladang jagung dan kelapa sawit yang merugikan penduduk lokal.

"Merana sekali sekarang hidup kami, sagu yang menjadi sumber kehidupan kami berangsur mulai hilang akibat telah berganti dengan jagung dan kelapa sawit," ujarnya.

Di Keerom, Masyarakat Adat mengalami kesulitan besar akibat proyek *food estate* yang menggusur hutan-hutan adat mereka. Kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan perusahaan perkebunan ketimbang Masyarakat Adat setempat. Penggusuran paksa dan pembukaan lahan skala besar mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem yang selama ini menopang kehidupan Masyarakat Adat.

Sejak 2021, Masyarakat Adat Awyu dan Moi telah berjuang mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan dukungan pemerintah. Namun, Masyarakat Adat tidak bisa berbuat banyak, apalagi melawan karena akan beresiko. Para aktivis yang menentang proyek dikriminalisasi.

Proyek Strategis Nasional (PSN) dimulai di era Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla periode 2014–2019, kemudian dilanjutkan pada Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin periode 2019–2024. PSN diatur dalam Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Untuk mempercepat pelaksanaannya, dikeluarkanlah Inpres Nomor 1 Tahun 2016, yang memberikan perintah kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PSN.





*Deforestasi yang dilakukan oleh PT Global Papua Abadi untuk dijadikan perkebunan tebu bagian dari proyek Food Estate Industri Tebu & Bioethanol.*  
Sumber Foto : Pusaka Bentala Rakyat.



Namun, dalam pelaksanaannya, PSN justru menyarar sejumlah wilayah adat. Alih-alih wilayah yang telah didiami oleh Masyarakat Adat tersebut diakui dan dilindungi, kenyataannya wilayah tersebut justru dirampas dan diberikan kepada pihak lain, sementara Masyarakat Adat sebagai pemilik wilayah tersebut diusir dari tanah adat mereka.

Di berbagai daerah yang terdampak proyek *food estate*, Masyarakat Adat menghadapi tantangan besar akibat perampasan tanah dan degradasi lingkungan. Komunitas Masyarakat Adat yang terdampak terus berjuang mempertahankan wilayah adat, salah satunya dengan mendokumentasikan pelanggaran dan membawa kasus ini ke tingkat nasional maupun Internasional. Pada tahun 2022 misalnya, komunitas Masyarakat Adat Keerom, dengan didampingi oleh AMAN dan organisasi lainnya, melaporkan perampasan wilayah adat mereka ke Komnas HAM. Laporan ini diharapkan dapat mendorong tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proyek tersebut serta memberikan perlindungan bagi hak-hak Masyarakat Adat yang terancam.

Upaya advokasi terus dilakukan melalui berbagai jalur. Selain mendokumentasikan kasus dan membawa laporan ke lembaga negara, komunitas Masyarakat Adat bersama organisasi pendukungnya juga mendorong pengakuan hukum atas wilayah adat melalui pendaftaran tanah serta litigasi strategis. Di sisi lain, kampanye publik dan tekanan terhadap investor menjadi bagian dari strategi untuk menghentikan proyek-proyek yang merugikan komunitas Masyarakat Adat.

AMAN juga terus berupaya memperkuat basis gerakan di tingkat komunitas, agar dapat mendorong perlawanan yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta hak-hak Masyarakat Adat.



Catatan Akhir Tahun AMAN menggaris bawahi bahwa selama 10 tahun Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal memenuhi janji politiknya kepada Masyarakat Adat. Tidak satupun dari 6 komitmennya terhadap Masyarakat Adat yang dipenuhi. Sebaliknya, selama 10 tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo malah mengambil langkah-langkah sebaliknya. Berbagai Undang-Undang dan kebijakan yang dihasilkan dalam masa pemerintahannya justru menjadi alat untuk melegitimasi perampasan wilayah adat.

Berharap perubahan pada pemerintahan yang baru pun tampak kurang masuk akal. Jika kita amati visi-misi Prabowo dan Gibran, tidak satu komitmen pun untuk perlindungan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat. Kecuali menyebut RUU Masyarakat Adat yang disampaikan secara lisan oleh Wakil Presiden Gibran saat pelaksanaan debat Calon Wakil Presiden tahun 2024.

Pada akhirnya, berbagai praktik Proyek Strategis Nasional selalu berujung pada perampasan lahan yang melibatkan tindakan represif aparat keamanan, konflik agraria yang berkepanjangan, serta rusaknya ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal. Program food estate yang dicanangkan kembali oleh Prabowo Subianto justru semakin menegaskan tumpang tindih antara pola pikir dan praktik kebijakan pemerintah dan hanya akan menambah rekam jejak kegagalan yang terus berulang. Dengan berbagai dampak yang telah terjadi, muncul pertanyaan : mungkinkah program ini menjadi solusi bagi ketahanan pangan atau justru ancaman yang semakin nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan hak-hak Masyarakat Adat.



*Masyarakat Adat Suku Yei menolak wilayah adat mereka dirampas negara & korporasi atas nama investasi.*

*Sumber Foto : Pusaka Bentala Rakyat.*



## Air sebagai Sumber Daya Strategis: Antara Kearifan Masyarakat Papua dan Ekspansi Proyek Strategis Nasional

Oleh: Franky Samperante,  
Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.



*Masyarakat Adat Geleq Malak Kalawilis Pasa menunjukkan udang sungai hasil tangkapannya.  
Sumber Foto: Ulet Ifansasti / Pusaka Bentala Rakyat*

**B**agi masyarakat adat Papua, air bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari identitas sosial dan sistem penghidupan yang dikelola dan diwariskan turun temurun. Sungai, rawa, dan mata air bukan hanya tempat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga ruang hidup dan sakral yang menjadi bagian dari sistem kosmologi masyarakat. Melalui pengetahuan kearifan, sistem nilai dan aturan adat, keseimbangan air terus dijaga sebagai bagian dari upaya melindungi ekosistem yang lebih luas.

Masyarakat Papua memiliki pengetahuan turun-temurun dalam mengelola sumber daya air yang berbasis kearifan lokal, termasuk larangan adat dan praktik pemanfaatan sumber daya yang harmonis dengan alam, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, keseimbangan ekosistem air kini berada dalam ancaman akibat ekspansi proyek strategis nasional yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan.



Sejak Papua diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, wilayah ini menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah Orde Baru membuka keran investasi bagi perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan yang terus berlangsung hingga era reformasi. Di bawah skema Otonomi Khusus Papua yang diperkenalkan pada 2001, eksploitasi sumber daya berlangsung atas nama percepatan pembangunan, dan sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Distrik Jair dan Subur di Kabupaten Boven Digoel menjadi contoh nyata dampak buruk proyek ekstraktif skala besar terhadap ekosistem air. Sebelum ekspansi industri, masyarakat setempat mengandalkan sungai untuk minum, mandi, dan mengolah sagu. Namun, masuknya perusahaan seperti PT Bade Makmur Orissa, PT Tunas Sawa Erma, PT Bio Inti Agrindo, PT Inocin, dan aktivitas industri pengolahan kayu lainnya, limpasan limbahnya dan penggunaan pestisida berlebihan telah mencemari sungai dan meningkatkan kadar racun dalam sungai. Air sungai menghitam, ikan-ikan mati, dan tanaman menguning akibat pencemaran. Warga suku Wambon, yang masih bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gatal-gatal dan penyakit kulit. Hasil uji laboratorium menunjukkan pencemaran air sungai telah melampaui ambang batas yang dapat ditoleransi. Perubahan fisik pada ikan, seperti kepala yang mengecil, ekor menyusut, serta luka-luka di tubuh, menunjukkan dengan jelas bagaimana pencemaran air akibat zat kimia berbahaya telah merusak ekosistem perairan.

Seiring dengan rencana pemerintah untuk membuka lebih 2 juta hektar hutan dan lahan bagi investasi sektor kehutanan, perkebunan pangan dan energi, Papua direncanakan menjadi frontier baru bagi ekspansi kapital dan proyek pembangunan ekonomi yang dikendalikan segelintir pemodal. Penelitian Parsch (2022) mengungkap bahwa luas izin konsesi industri ekstraktif, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur jauh melampaui luas hutan lindung yang tersisa. Sejak awal 2000-an, kendaraan berat seperti traktor dan bulldoser mulai masuk ke pedalaman Sorong, Manokwari, Fakfak, hingga Merauke. Deru chainsaw dan ekskavator tak henti-hentinya membelah hutan, menumbangkan pohon-pohon raksasa yang telah hidup ratusan, bahkan ribuan tahun dan mengotori sungai dengan lumpur serta limbah industri.





Hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat serta tempat bernaungnya keanekaragaman hayati kini terus terusik oleh ekspansi perkebunan monokultur kelapa sawit, tebu, dan bioetanol, yang mengubah lanskap ekologis dan mengancam keseimbangan lingkungan. Perubahan tutupan lahan ini mengganggu daerah aliran sungai, meningkatkan sedimentasi, serta menurunkan kualitas air. Penelitian Biantama Asmara dan Timothy O. Randhir dari University of Massachusetts (2023) menunjukkan bahwa perkebunan sawit di daerah aliran Sungai Kais, Sorong Selatan, menyebabkan peningkatan sedimentasi sebesar 16,9 persen serta kenaikan kadar nitrogen dan fosfor. Akibatnya, ekosistem perairan terganggu dan menciptakan zona mati (*dead zone*) yang sulit dipulihkan.

Hilangnya hutan di hulu sungai Kais, Metamani, Kamundan, dan Sorong Selatan menyebabkan banjir besar yang merendam kampung serta lahan penghidupan warga. Di kepala Kali Maro, Kumb, dan Mbian di Merauke, penggundulan hutan telah menghilangkan habitat burung kuning, rusa, dan babi hutan. Ketika hutan tak lagi mampu menyerap air hujan, banjir pun menghancurkan pemukiman di pesisir Merauke dan memaksa penduduk mengungsi.

Alih-alih mengakui dampak kebijakan pembangunan yang keliru, pemerintah dan perusahaan kerap menyalahkan faktor alam atas bencana yang terjadi. Narasi ini menutupi fakta bahwa deforestasi dan eksploitasi industri berkontribusi langsung pada krisis lingkungan yang melanda Papua. Lebih jauh, proyek-proyek strategis nasional ini sering kali mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. Militerisasi wilayah adat semakin memperburuk kondisi masyarakat yang berusaha mempertahankan tanah dan sumber airnya. Di Boven Digoel dan Yahukimo, misalnya, kehadiran militer dalam proyek perkebunan dan tambang justru menjadi ancaman bagi masyarakat adat. Di Boven Digoel, aparat keamanan dikerahkan untuk mengawal pembukaan lahan perkebunan skala besar, yang berujung pada penyikiran paksa dan pembatasan akses rakyat dari sumber pangan dan sumber penghidupan di wilayah adat mereka. Di Yahukimo, penolakan masyarakat terhadap ekspansi tambang disambut dengan penangkapan dan tindakan kekerasan. Rezim militer semakin meminggirkan masyarakat adat dengan membatasi ruang gerak dan kebebasan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah serta sumber daya air yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

**Deforestasi oleh PT IKSJ di Wilayah Adat milik Masyarakat Adat Moi Sigin, di Sorong Selatan, Papua Barat.**  
Sumber Foto: Pusaka Bentala Rakyat



Masyarakat adat Papua menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan sumber daya air dan hutan. Intimidasi, kriminalisasi, serta tekanan dari berbagai pihak menjadi bagian dari realitas sehari-hari dalam perjuangan mempertahankan wilayah adat. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat malah terus diterjunkan untuk mengawal proyek-proyek strategis nasional yang merampas tanah ulayat, menyebabkan meningkatnya tindakan represif terhadap masyarakat adat.

Menolak untuk tunduk, masyarakat terus mengembangkan berbagai inisiatif untuk mempertahankan hak atas tanah dan air yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Di Merauke, Sorong dan Sorong Selatan, komunitas adat mengambil inisiatif untuk memetakan wilayah adat sebagai bentuk perlindungan atas tanah dan sumber daya air mereka. Pemetaan ini tidak hanya menjadi alat hukum untuk menegaskan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Selain itu, masyarakat adat terus membangun solidaritas dengan organisasi lingkungan dan gerakan hak asasi manusia untuk melawan kriminalisasi serta tekanan dari aparat keamanan di wilayah adat.

Bagi masyarakat Papua, mempertahankan sumber daya air bukan hanya tentang melindungi lingkungan, tetapi juga mempertahankan kehidupan dan identitas mereka. Hilangnya akses terhadap air bersih mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Menolak eksploitasi dan mempertahankan hak atas air bukan hanya upaya untuk menjaga ekosistem, tetapi juga bagian dari mempertahankan warisan leluhur yang harus terus diperjuangkan. Perlawanan terhadap eksploitasi ini terus berlanjut di tengah ancaman yang terus membayangi tanah Papua.

*Deforestasi oleh PT. Selaras Inti Semesta di Kampung Zanegi, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.  
Sumber Foto: betahita.id*





## Antara Hilirisasi dan PSN: Di Mana Hak Masyarakat Adat ?

Oleh Wulan Putri,  
Staff Infokom PB AMAN.

**A**mbisi hilirisasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) digadang-gadang sebagai tonggak pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah berupaya mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam, terutama di sektor tambang dan energi, dengan proyek besar seperti Morowali, Banggai, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, di balik narasi kemajuan ini, ada satu pertanyaan mendasar: bagaimana nasib Masyarakat Adat di tengah gempuran industrialisasi yang semakin luas ?

Hilirisasi bukan sekadar transformasi bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Hilirisasi adalah proyek besar yang membutuhkan lahan luas, infrastruktur, dan tenaga kerja. Dampaknya, ruang hidup Masyarakat Adat semakin terdesak. Di berbagai daerah, ekspansi industri tambang dan perkebunan telah mengubah lanskap ekologi dan sosial. Lahan-lahan adat beralih fungsi, akses ke sumber daya alam menyempit. Sementara, janji kesejahteraan justru berujung pada ketimpangan dan konflik agraria.

Di Morowali, ekspansi industri nikel terbesar di Indonesia telah mengubah struktur sosial dan lingkungan secara drastis. Sejak proyek ini dimulai, tanah adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dialihkan menjadi kawasan industri yang dikendalikan oleh perusahaan besar. Pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung tidak hanya menggeser ruang hidup Masyarakat Adat, tetapi juga menyebabkan pencemaran sungai dan pesisir yang mengancam keberlanjutan perikanan tradisional. Sementara itu, warga yang mencoba mempertahankan hak atas tanah mereka menghadapi berbagai bentuk intimidasi, dari kriminalisasi hingga kekerasan fisik. Banyak aktivis dan warga lokal yang ditangkap atau dipersekusi karena menolak ekspansi industri yang semakin luas ini.

**Tambang Nikel Raja Ampat.**  
Sumber Foto: Dokumentasi Jubi





Sementara itu di Banggai, pembangunan industri nikel juga membawa dampak serupa. Konflik lahan semakin tajam, dengan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Polusi udara dan limbah industri juga semakin memperburuk kondisi kesehatan warga sekitar, menambah daftar panjang dampak negatif industrialisasi di wilayah ini.

Kasus yang sama terjadi di Kalimantan Barat, di mana Masyarakat Adat yang telah memperoleh sertifikat tanah tetap menghadapi penggusuran demi kepentingan industri. Proses sertifikasi yang seharusnya menjadi jaminan kepemilikan justru tidak mampu melindungi mereka dari kepentingan investasi skala besar. Konflik tanah ini berulang di berbagai daerah, memperlihatkan bagaimana kebijakan negara masih lebih berpihak pada korporasi dibanding Masyarakat Adat.

Di berbagai daerah, Masyarakat Adat terus menghadapi penggusuran meski pun telah mendapatkan sertifikat tanah. Negara seolah menerapkan standar ganda: di satu sisi memberikan pengakuan hak melalui sertifikasi, di sisi lain tetap meminggirkan Masyarakat Adat demi investasi. Pola ini terus berulang dengan dukungan kebijakan yang lebih berpihak kepada korporasi.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa pada 2024 telah terjadi 121 kasus perampasan wilayah adat yang mencaplok setidaknya 2,8 juta hektare. Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan langkah signifikan untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang diharapkan memberi perlindungan hukum yang jelas.

Deputi Sekretaris Jenderal AMAN Erasmus Cahyadi menyoroti kebijakan pemerintah lebih banyak mengakomodasi kepentingan korporasi dibanding melindungi Masyarakat Adat.

"Masyarakat Adat selalu dihadapkan pada situasi yang tidak adil, dijanjikan perlindungan tetapi kebijakan yang ada justru lebih banyak mengakomodasi kepentingan korporasi dan proyek strategis," ujarnya.



2,8  
JUTA  
HEKTAR

Wilayah Adat  
dirampas paksa  
oleh Negara &  
Korporasi & selalu  
disertai dengan  
Kriminalisasi &  
Kekerasan.



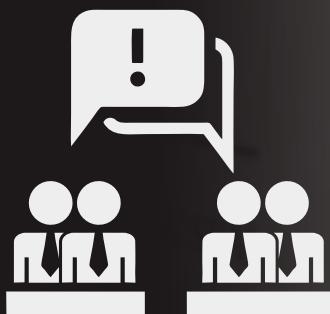
RUU Masyarakat Adat telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali diusulkan. Sejak 2009, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah beberapa kali masuk dan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa ada kepastian pengesahan. Berbagai upaya telah dilakukan AMAN, termasuk roadshow ke fraksi-fraksi di parlemen untuk mencari dukungan dari DPR. Namun, kepentingan politik dan ekonomi kerap menjadi hambatan utama. Pergantian kepemimpinan di negeri ini dan prioritas legislasi membuat perjuangan untuk mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat terus tertunda. Selain itu, lobi dari sektor industri dan investasi sering kali lebih diutamakan dibanding kepentingan Masyarakat Adat. Untuk itu, dorongan dari masyarakat sipil dan media sangat diperlukan agar perlindungan hak Masyarakat Adat tetap menjadi agenda kebijakan yang mendesak.

Erasmus juga mencatat bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 lalu, misalnya, hanya 17 dari 545 daerah yang mengangkat isu Masyarakat Adat dalam debat Calon Kepala Daerah. Ini menunjukkan bahwa Calon Kepala Daerah lebih fokus pada kepentingan ekonomi dan pembangunan daripada memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat. Pilkada yang seharusnya menjadi ajang memperjuangkan hak rakyat, tetapi faktanya Masyarakat Adat semakin terpinggirkan.

dari  
**545**  
Daerah  
Pilkada  
2024

hanya  
**17**

yang mengangkat  
Isu Masyarakat Adat  
dalam Debat Calon  
Kepala Daerah



Pemungutan Suara Pilkada 2024.  
Sumber Foto: detik.net.id



Pemerintah terus mendorong PSN dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi ironisnya, banyak kebijakan justru memperburuk ketimpangan bagi Masyarakat Adat. Hilirisasi semestinya tidak hanya berbicara soal industri, tetapi juga bagaimana model pembangunan ini dapat berjalan berdampingan dengan keadilan sosial dan ekologis. Jika tidak ada perubahan mendasar dalam paradigma kebijakan, maka pembangunan yang eksploratif akan terus mengulang sejarah: pemunggiran Masyarakat Adat dan hancurnya ekosistem yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Di era pemerintahan Prabowo, arah kebijakan ekonomi semakin menitikberatkan pada eksplorasi sumber daya alam dengan justifikasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Retorika hilirisasi terus didorong sebagai solusi peningkatan nilai tambah industri, tetapi tanpa regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat. Selain itu, kebijakan ekonomi yang lebih pro-korporasi dan investasi asing memperkuat posisi industri besar dibandingkan komunitas Masyarakat Adat yang terdampak.

Janji Prabowo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, dan kawasan industri, berpotensi semakin mempersempit ruang hidup Masyarakat Adat. Sementara investasi terus mengalir ke sektor energi dan tambang, perlindungan lingkungan dan hak-hak Masyarakat Adat belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Dengan meningkatnya kontrol militer dalam proyek strategis, tekanan terhadap komunitas Masyarakat Adat yang menolak proyek-proyek tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkat.

Di tengah situasi ini, perjuangan untuk pengesahan RUU Masyarakat Adat harus semakin kuat dan solid. Konsolidasi antar-komunitas, advokasi yang lebih masif, serta tekanan kepada pemerintah dan parlemen menjadi langkah mendesak untuk diprioritaskan. Media dan masyarakat sipil harus terus turut mengawal agar isu ini tidak tenggelam dalam arus besar proyek pembangunan yang mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah pemilik sah atas tanah dan budayanya sendiri. Jika pemerintah serius dengan komitmen keadilan sosial, tidak ada alasan lagi untuk menunda perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Pertanyaannya sekarang, akankah negara berpihak, atau justru terus membiarkan Masyarakat Adat tersingkir atas nama pembangunan ?





# Sekolah Adat di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Menerapkan Pendidikan Berbasis Pertanian

**S**ekolah Adat di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Papua New Guinea menerapkan metode pendidikan berbasis pertanian untuk Masyarakat Adat.

Sekolah Adat yang berlokasi di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi Masyarakat Adat yang terbatas akses jangkauan ekonominya ke perkotaan.

Oleh: Nesta Makuba,  
Jurnalis Masyarakat Adat dari Jayapura, Papua.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (LP2MA) Mindiptana, Yohanes Nongyap mengatakan sekolah adat Mindiptana sudah berdiri sejak tiga tahun lalu. Sekolah adat Mindiptana menerapkan metode pendidikan pertanian. Menurut Yohanes, pendidikan pertanian ini sudah lama diterapkan, salah satunya pertanian rakyat dengan memanfaatkan pekarangan rumah para siswa yang tinggal di kampung Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel.



*Penyuluhan Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Boven Digoel memberikan materi tentang teknik menanam sayuran pada peserta didik Sekolah Adat Mindiptana.*  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.

\* Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Jayapura, Papua



Yohanes menyebut ada 20 siswa yang belajar di sekolah adat Mindiptana. Mereka dilatih untuk bercocok tanam memanfatkan pekarangan rumah. Rata-rata para siswa yang berasal dari kampung ini memiliki pekarangan rumah yang cukup luas.

Dikatakannya, areal pekarangan rumah para siswa sekolah adat Mindiptana ini dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran, tomat, rica dan berbagai kebutuhan pokok Masyarakat Adat.

"Pendidikan pertanian di sekolah adat Mindiptana ini sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Adat di sini, apalagi kondisi iklimnya cocok untuk pertanian," ungkap Yohanes pekan lalu.

Selain menerapkan pendidikan pertanian, sebutnya, sekolah adat Mindiptana juga mengajarkan siswanya cara mengelola perikanan darat. Yohanes menambahkan hal ini diterapkan setelah melihat potensi alam wilayah adat Mindiptana yang miliki sungai-sungai besar dengan potensi perikanan air tawar yang cukup menjanjikan.

### Fasilitator dari Kampung

Yohanes mengatakan sekolah adat Mindiptana dikelola oleh tiga orang fasilitator. Dua orang petani lokal didatangkan dari kampung, sedangkan satu orang lagi penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Boven Digoel. Ketiga fasilitator tersebut bertugas untuk mendidik dan melatih para siswa yang belajar di sekolah adat Mindiptana.

Yohanes menerangkan para fasilitator yang dilibatkan dalam sekolah adat ini sudah lebih dulu mengikuti kelas khusus pertanian dan telah menerapkannya. Jadi, kemampuannya sebagai fasilitator tidak diragukan lagi.

"Fasilitatornya kami ambil dari kampung. Ini cara kami untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan cara, bahasa dan budaya serta kebiasaan mereka sehari-hari di kampung," tuturnya.



*Peserta didik Sekolah Adat Mindiptana sedang belajar mengoperasikan aplikasi excel di komputer.*

*Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*



Sarah, salah satu peserta didik sekolah adat Mindiptana, mengaku sangat terbantu dengan adanya sekolah adat yang khusus mengajarkan cara bertani yang baik. Ia menyebut lahan pekarangan rumah yang tadinya kosong dan tidak dimanfaatkan, kini sudah ditanami sayuran dari hasil belajar di sekolah adat. Hasilnya, bisa untuk kebutuhan keluarga dan juga bisa dijual ke pasar.

"Kami sangat terbantu dengan adanya sekolah adat ini. Saya bisa bercocok tanam di pekarangan rumah, hasilnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga," ujarnya.

Sarah juga mengaku mulai mengembangkan perikanan darat dengan membuat kolam-kolam ikan lele memanfaatkan teknologi terpal sebagai media kolam untuk pemanfaatan lahan dan air.



**Peserta didik Sekolah Adat Mindiptana memanen sayuran dari kebun kolektif.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



### Penyelarasan Sekolah Adat

L.M. Arifin dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Papua mengatakan penyelarasan sekolah adat dengan berbagai metode belajar ini perlu dilakukan. Hal ini menjadi sasaran bagi Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada tutor atau guru sekolah adat sehingga mereka dapat mengembangkan potensi sesuai karakteristik wilayah dan budayanya masing-masing.

"Kami berharap mereka yang sudah biasa di sekolah adat memahami pembelajaran, agar mereka melakukan asesmen potensi mereka di sekolah adat. Ini penting agar mereka dapat menyusun modul untuk mereka gunakan mengajar di sekolah adat masing-masing," jelas Arifin.

\*\*\*



*Peserta didik Sekolah Adat Mindiptana memanen sayuran dari kebun kolektif.*  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



## Refleksi 13 tahun BPAN: Konsistensi Pemuda Adat untuk Menjaga & Melindungi Kampung

Oleh Hero Aprila, \*  
PJ Ketua Umum BPAN.



Foto Bersama Pemuda Adat Pengurus BPAN.

Sumber foto: Dokumentasi BPAN.

"Pemuda Adat! Bangkit, Bersatu, Bergerak Mengurus Wilayah Adat!" Tiga belas tahun telah berlalu sejak teriakan itu pertama kali digaungkan oleh ratusan Pemuda Adat di Curug Nangka, Bogor, pada 29 Januari 2012. Saat itu, Pemuda Adat dari berbagai penjuru Nusantara sepakat mendeklarasikan wadah organisasi bernama Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN).

Lahirnya BPAN berangkat dari semangat Pemuda Adat yang merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi berbagai persoalan yang dialami Masyarakat Adat, baik di tingkat nasional maupun global, dan terutama sekali di kampung mereka masing-masing.

Stigma, diskriminasi, kriminalisasi, hingga intimidasi kerap menimpa Masyarakat Adat. Kampung yang kaya akan sumber daya alam sering kali menjadi target eksploitasi, memicu beragam konflik. Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam 10 tahun terakhir terjadi 687 konflik agraria, lebih dari 925 Masyarakat Adat dikriminalisasi, 60 orang mengalami kekerasan oleh aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

Data ini menunjukkan bahwa kerentanan Masyarakat Adat masih berlangsung hingga hari ini. Pemuda Adat menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak dalam konflik tersebut. BPAN hadir sebagai wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas bagi Pemuda Adat di seluruh Nusantara, baik dalam advokasi, ekonomi, maupun kebudayaan.

Organisasi ini juga mempersiapkan generasi muda adat untuk mengambil peran kepemimpinan, baik di struktur adat komunitas maupun organisasi. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka kelak bisa menempati posisi strategis di pemerintahan untuk terus menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat.



### Dinamika Estafet Kepemimpinan Organisasi

Sebagai organisasi sayap AMAN, BPAN memiliki mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di tingkat nasional, yaitu Jambore Nasional (JAMNAS), yang dihadiri anggota BPAN dari tujuh region di seluruh Nusantara.

Sejak didirikan pada 2012, BPAN telah menyelenggarakan empat kali JAMNAS. Terakhir, JAMNAS IV dilaksanakan secara daring pada 2022. Saat itu, Michellin Sallata, seorang Perempuan Adat asal Toraja, terpilih sebagai Ketua Umum BPAN periode 2022-2026 melalui musyawarah mufakat. Namun, pada akhir 2023, Michellin menyatakan tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya.

Mundurnya Michellin Sallata menjadi bagian dari dinamika organisasi. Memimpin BPAN dalam skala nasional tentu bukan tugas mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Untuk merespons situasi ini, Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) melakukan konsolidasi di tujuh region: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, Kepulauan Maluku, dan Papua.

Konsolidasi berlangsung selama hampir enam bulan dan sempat mengalami kendala karena pemilihan pertama dianulir dan tidak diterima sebagian anggota BPAN. Setelah proses ulang di masing-masing region, pada 29 April 2024, saya, Hero Aprila, terpilih sebagai Penjabat (PJ) Ketua Umum BPAN hingga 2026. Keputusan itu dilegitimasi melalui Surat Keputusan (SK) Sekjen AMAN No. 010/SK.Sekjen/PB-AMAN/V/2024 yang dikeluarkan pada 29 Mei 2024 tentang Revisi Keputusan Pengesahan Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara.





## Usia Bukan Penghalang

Pada JAMNAS IV juga terjadi beberapa perubahan Statuta, termasuk perpanjangan periode kepengurusan dari tiga tahun menjadi empat tahun, serta perubahan batas usia anggota BPAN dari 15-35 tahun menjadi 15-30 tahun.

Perubahan batas usia anggota BPAN itu menjadi tantangan bagi individu maupun organisasi. Seolah-olah, anggota yang berusia di atas 30 tahun tidak lagi menjadi bagian dari BPAN, meskipun masih merasa sebagai Pemuda Adat.

Namun, tantangan ini akhirnya diatasi melalui peraturan organisasi satu tingkat di bawah Statuta BPAN, yaitu Anggaran Rumah Tangga (ART) BPAN. Pada Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa anggota yang telah melewati batas usia 30 tahun akan menjadi Purna BPAN. Pasal 3 Ayat (2) juga menegaskan bahwa Purna BPAN tetap memiliki hak mengikuti kegiatan BPAN serta dapat mengusulkan individu dari komunitas Masyarakat Adat untuk menjadi anggota baru.

Meski demikian, implementasi aturan ini tidak semudah yang dibayangkan. Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang telah diketok palu, pelaksanaannya harus terus dikawal oleh pimpinan dan tim kerja agar berjalan sesuai kesepakatan.

Selain itu, BPAN telah berhasil mencetak kader yang kini menempati posisi strategis di organisasi induk, AMAN. Beberapa di antaranya: Jhontoni Torihoran, Ketua Umum BPAN Periode 2015-2018 yang hari ini menjabat sebagai Ketua PH AMAN Wilayah Tano Batak; Herson sebagai Ketua PH AMAN Wilayah Nusa Bunga; Ferdi sebagai Ketua PH AMAN Wilayah Kalteng; Solihin sebagai Ketua PH AMAN Daerah Sinjai; Junaedi sebagai Ketua PH AMAN Daerah Sembalun; Mustaqim (Uta) sebagai Ketua PH AMAN Daerah Gowa; dan Hamra Pj. sebagai Ketua PH AMAN Daerah Luwu Timur.

Capaian ini membuktikan bahwa BPAN telah berperan dalam meningkatkan kapasitas Pemuda Adat sebagai pemimpin berintegritas yang siap mengawal perjuangan Masyarakat Adat. Pemuda Adat bukan sekadar pewaris, tetapi juga penjaga bumi dan seluruh keanekaragaman hayati di dalamnya.

## Capaian BPAN dalam 13 Tahun Terakhir

Sejak didirikan, BPAN telah menginisiasi dan mengorganisir gerakan Pemuda Adat di seluruh Nusantara. Gerakan ini bertolak dari sejarah panjang perjuangan Masyarakat Adat, bahkan sebelum Indonesia berdiri.

Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, "Sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda, angkatan tua itu jadi beban." Pernyataan ini menegaskan peran sentral generasi muda dalam sejarah Indonesia. Sayangnya, peran Masyarakat Adat dan Pemuda Adat dalam perjuangan kemerdekaan jarang diakui dalam buku sejarah, padahal komunitas adat memiliki sejarahnya sendiri dalam mempertahankan wilayah dan identitas mereka.

Sebagai bagian dari perjuangan tersebut, BPAN menggagas Gerakan Pulang Kampung, yang mengajak Pemuda Adat yang tinggal di kota untuk kembali ke kampung guna menjaga dan melindungi wilayah adat. Gerakan ini juga telah disuarakan dalam berbagai forum internasional, yang lantas dipraktikkan di wilayah mereka masing-masing, seperti di Brazil, Afrika, dan Amerika Latin.

Namun, ketika seorang Pemuda Adat kembali ke kampung, ia sering menghadapi stigma: "Jauh-jauh sekolah di kota, kok malah pulang kampung?"

Orang-orang yang beranggapan demikian tidak memahami bahwa kampung dan kota itu setara. Di kota, tidak ada hutan, tanaman obat, sumber air bersih, atau sayur dan buah segar. Bahkan, ikan di kota bisa saja sudah mati sepuluh kali sebelum dikonsumsi. Lalu, apa artinya kota tanpa kampung?



Sayangnya, kampung yang kaya akan sumber daya alam sering kali dilihat sebagai objek eksplorasi oleh perusahaan dan negara. Alih-alih melindungi Masyarakat Adat, TNI dan Polri justru lebih sering berpihak pada korporasi dan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat. Ini terjadi karena belum adanya payung hukum yang benar-benar memberikan perlindungan bagi Masyarakat Adat.

Untuk itu, BPAN juga turut mendorong pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat Pemuda Adat. Gerakan Pulang Kampung juga harus menjadi bagian dari itu. Pemuda Adat perlu menguatkan simpul-simpul komunitas adat, melindungi, dan mengurusi wilayah adat. Karena kampung adalah rumah, dan di sanalah masa depan kita.





PERNYATAAN SIKAP  
KOALISI KAWAL RUU MASYARAKAT ADAT

## International Women's Day 2025: Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Jalan Keluar Memastikan Ruang Penghidupan Perempuan Adat

Jakarta, 8 Maret 2025 – Upaya memperjuangkan hak Perempuan Adat kembali digaungkan dalam peringatan *International Women's Day* (IWD) 2025. Perempuan Adat adalah garis terdepan dalam merawat alam dan penghidupan, serta mempertahankan hak komunitas mereka. Peran Perempuan Adat krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan pangan. Merekat bukan hanya pengguna hutan dan tanah, tetapi juga merawat budaya tradisi dan penjaga pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan Adat membuat ruang hidup Perempuan Adat semakin terbatas.

Di tengah tantangan ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, kami berharap segera dibahas dan disahkan. Veni Siregar, koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan RUU Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan lebih dari dua dekade seharusnya menjadi solusi konkret untuk DPR RI memperjuangkan dengan mengesahkan kebijakan ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat.



Perempuan Adat Papua sedang menari dalam Pawai Budaya KMAN VI di Sentani Papua.  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



"Tanpa payung hukum yang kuat, Masyarakat Adat, terutama Perempuan Adat, terus menghadapi ancaman kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi saat memperjuangkan hak Masyarakat Adat," ucap Veni.

Menurut Veni, RUU ini akan memastikan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak penuh atas wilayahnya, serta mekanisme perlindungan dari berbagai bentuk perampasan tanah. Pengesahan RUU Masyarakat Adat juga akan memperkuat posisi Perempuan Adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Salah satunya di Masyarakat Adat Toro, yang merupakan suku asli Kulawi atau biasa disebut Komunitas Adat Toro. Komunitas ini memiliki pranata, dan kelembagaan adat sangat kuat. Mereka memiliki sistem tersendiri dalam pemanfaatan sumber daya alam, terlebih menginternalisasikan peran perempuan sebagai pemegang otoritas kultural. Perempuan Adat Toro berwenang merancang pekerjaan dalam pertanian, mendinginkan konflik dalam kampung, dan mengatur kerja-kerja pengelolaan sawah dan ladang, seperti menentukan kapan waktu tepat untuk panen.





Dalam praktik kehidupan bermasyarakat Toro, perempuan memiliki posisi yang kuat. *Tina ngata* atau ibu kampung memegang peran dominan dalam mengambil keputusan. Misal, setiap kegiatan musyawarah kampung, harus dihadiri oleh *tina ngata*. Tanpa kehadiran *tina ngata*, maka keputusan musyawarah seperti tidak memiliki keabsahan kultural dan harus dibatalkan.

"Perempuan Adat sudah seharusnya mendapatkan ruang berbicara lebih banyak saat membahas tentang Sumber Daya Alam (SDA). Perempuan Adat harus setara dalam semua lini," tegas Rukmini Paata Toheke, Perempuan Adat Toro.

Yael Stefany, Tim Kampanye Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan "Secara nyata, Perempuan Adat di berbagai daerah telah menunjukkan ketangguhannya dalam melindungi tanah dan hutan. Sejumlah komunitas adat telah berhasil mengelola hutan adat secara berkelanjutan, menjaga biodiversitas, serta membangun ekonomi berbasis kearifan lokal." Yael juga menambahkan, praktik-praktik seperti Komunitas Adat Toro ini membuktikan bahwa Perempuan Adat bukan hanya pelindung lingkungan, tetapi juga pemimpin dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk kami IWD 2025 bukan sekadar perayaan, ini momentum penting untuk memperkuat solidaritas bersama bagi perempuan untuk turut memperjuangkan suara Perempuan Adat untuk terus mempertahankan hak atas tanah, identitas, dan kehidupan mereka. Dalam momentum IWD 2025, kami Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan beberapa tuntutan utama, diantaranya: 1) Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat; 2) Menghentikan Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Perempuan Adat; 3) Memastikan Ruang Penghidupan Perempuan Adat yang aman dan berkeadilan

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, untuk bersama-sama memperjuangkan hak Perempuan Adat yang selama ini terpinggirkan. Di momen Hari Perempuan Internasional (IWD) 2025 ini, mari kita tegaskan komitmen nyata dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai langkah krusial untuk melindungi, memberdayakan, dan mengakui peran penting Perempuan Adat dalam menjaga budaya, lingkungan, dan keberlanjutan komunitas mereka," tutup Veni.

Aksi International Women's Days di Jakarta, 8 Maret 2025.  
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



## Sekjen AMAN Kunjungan ke Wilayah Adat Comboios Brazil: Perkuat Spirit Perjuangan Masyarakat Adat

Oleh Eustobio Rero Renggi,  
Deputi I Sekjen AMAN  
Urusan Organisasi.

**S**ekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi melakukan kunjungan ke wilayah adat Comboios di Negara Bagian Espírito Santo, Brazil disela rangkaian agenda konsolidasi Aliansi Global Komunitas Teritorial atau Global Alliance of Territorial Communities (GATC) pada 16-21 Februari 2025.

Rukka Sombolinggi yang juga anggota pemimpin Aliansi Global dalam pidato sambutannya saat mengunjungi komunitas tersebut menegaskan gerakan Masyarakat Adat tidak akan kuat, jika tidak dipimpin oleh para pemimpin Masyarakat Adat yang kuat.

Rukka menggambarkan situasi umum Masyarakat Adat yang ada di Asia, terkhusus di Indonesia.

"Di Indonesia, kami memiliki lebih dari 300 pengurus, dan beranggotakan 2.596 komunitas Masyarakat Adat. Dari ratusan pengurus tersebut, kami melayani 21 juta jiwa Masyarakat Adat," sebutnya.

Rukka menambahkan di Indonesia juga, kami memiliki kelompok Masyarakat Adat yang diambil kepunahan. Dan, ada juga kelompok Masyarakat Adat kami yang wilayah adatnya dikuasai oleh perusahaan pabrik kertas, sama seperti yang terjadi di Brazil. Kemudian, ada juga wilayah adat di Indonesia yang dihabisi oleh sawit.

Rukka menerangkan situasi yang terjadi di Masyarakat Adat seperti itu bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan sudah terjadi sejak Indonesia Merdeka. Bahkan, jauh sebelum itu (Indonesia Merdeka).

**Tarian Sambutan dari anak adat Comboios dalam Pembukaan Agenda Global Alliance Territorial Communities (GATC) / Aliansi Global Komunitas Teritorial di Brazil pada 16-21 Februari 2025.**  
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Pada kesempatan ini, Rukka juga menjelaskan situasi Masyarakat Adat yang sering menghadapi militerisme dan gempuran pembangunan. Padahal, Masyarakat Adat di Asia merupakan rumah bagi 70 persen populasi Masyarakat Adat di dunia yang berpotensi sangat rentan dari kriminalisasi dan lain-lain.

"Oleh karena itu, penting untuk kita saling berbagi dan saling mendukung sesama kita Masyarakat Adat," katanya sembari menyatakan di Aliansi Global, kita bersyukur karena mendapat dukungan dari para pendukung dan sahabat kita.

Rukka mengatakan Aliansi Global tidak akan berhasil sejauh ini, jika tidak ada dukungan dari para pendukung dan sahabat kita di tingkat global.

"Secara khusus, kita perlu berterima kasih kepada mereka," lanjut Rukka.

Pada penutup sambutannya, Rukka menegaskan sekaligus memperkuat spirit perjuangan Masyarakat Adat setempat yang mendiami wilayah Comboios dan para pemimpin Gerakan Masyarakat Adat yang hadir pada kesempatan itu.

"Nasib kita tidak ditentukan oleh pemerintah dan perusahaan, tapi ditentukan oleh genggaman tangan kita sendiri sebagai Masyarakat Adat. Kita harus terus berjuang agar mereka tunduk pada keputusan kita, karena ini adalah masa depan kita dan masa depan bumi yang kita cintai," tegas Rukka.

"Itulah sebabnya, para pemimpin kita harus terus dijaga agar bisa memimpin kita dan generasi muda kita bisa terus melanjutkan perjuangan kita di masa depan," lanjutnya.

## Wilayah Adat Comboios

Wilayah adat Comboios (*Terra Indigena Comboios*) merupakan teritori yang dikuasai dan dihuni oleh kelompok Masyarakat Adat Tupinikim dan Masyarakat Adat Guarani. Wilayah adat ini pernah terkena dampak langsung dari jebolnya bendungan (dam) Mariana di Brazil pada tahun 2015. Tragedi ini membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, membanjiri hutan, hingga mencemari sepanjang sungai Doce yang dianggap sakral oleh Masyarakat Adat di tempat itu.

Jebolnya bendungan Mariana juga telah mengakibatkan lumpur tebal dan beracun melanda wilayah adat Comboios di Negara Bagian Espírito Santo.

**Peserta Konsolidasi Global Alliance Territorial Communities (GATC) di Brazil pada Februari 2025.**  
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





# Teknologi Bahasa untuk Semua: Tantangan dan Peluang Pelestarian Bahasa Ibu

oleh: Marolop Manalu Gorga,  
Staf Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia adalah rumah bagi 718 bahasa ibu. Namun, merujuk data Ethnologue, hanya 17 bahasa yang berstatus "institutional" yang artinya diajar dan digunakan secara terstruktur. Sementara itu, 506 bahasa terancam punah, dan 14 bahasa telah punah.

Di tengah situasi memprihatinkan itu, teknologi bahasa membuka peluang baru untuk mendokumentasikan dan menghidupkan kembali bahasa ibu. Mesin penerjemah, *chatbot*, hingga transkripsi otomatis bisa memperluas penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari.

Namun tidak semua bahasa ibu mendapat dukungan. Di Nusantara, pengembangan teknologi bahasa lebih banyak berfokus pada Bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah besar—seperti Jawa dan Sunda. Sedangkan ratusan bahasa ibu lain masih tertinggal. Ketimpangan ini mempercepat risiko kepunahan dan eksklusi digital bagi Masyarakat Adat.

Bahasa adalah penjaga sejarah, budaya, dan identitas Masyarakat Adat. Saat satu bahasa punah, pengetahuan tradisional yang terkandung di dalamnya juga ikut hilang—termasuk filosofi hidup, praktik pengobatan, dan ritual yang diwariskan turun-temurun.

Lebih dari itu, bahasa juga harus dilihat sebagai produk pengetahuan yang hidup dalam ruang dan wilayah tertentu. Ketika wilayah adat hilang atau menyusut, bahasa ikut terancam punah. Contohnya, saat hutan adat hilang, banyak jenis tanaman juga lenyap. Jika tanaman itu tak lagi ditemukan, kata-kata yang mewakili mereka pun perlahan dilupakan.

Inilah realitas yang terjadi di banyak wilayah Nusantara. Kondisi Masyarakat Adat dan keragaman bahasa ibu menghadapi tantangan besar. Pelestarian bahasa ibu punya banyak tantangan, dan kepunahannya berbanding lurus dengan perubahan—kalau tidak mau disebut perampasan—bentang wilayah adat.

Kondisi ini saya sampaikan saat mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam konferensi Language Technologies for All (LT4All) di Markas UNESCO, Paris, pada 24–26 Februari 2025.



**Tim Dokumentasi Bahasa Suku Balik sedang melakukan wawancara dengan para tokoh adat Suku Balik untuk mendokumentasikan Bahasa Suku Balik yang Nyaris Punah.**

Sumber Foto : Tim Mini Ensiklopedia Masyarakat Adat Suku Balik



## Tantangan Teknologi Bahasa bagi Masyarakat Adat

Meskipun menawarkan solusi, teknologi bahasa masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan dalam pengembangan teknologi. Perusahaan teknologi besar (*big tech*) lebih tertarik mengembangkan teknologi untuk bahasa dengan jumlah penutur besar dan nilai ekonomi tinggi. Akibatnya, bahasa ibu dengan penutur sedikit sering diabaikan.

Proyek *open-source* yang cenderung terdesentralisasi sebenarnya dapat memberi ruang bagi komunitas adat untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi bahasa. Namun, proyek seperti ini sering terbentur masalah *resources* yang terbatas—terutama sekali pendanaan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses internet di komunitas adat. Tanpa internet yang memadai, teknologi bahasa tak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, sebagian besar bahasa ibu di Indonesia minim dokumentasi tertulis dan rekaman suara, sehingga sulit digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan (AI).

Tak hanya itu, ada pula persoalan etika dalam penggunaan data bahasa ibu. Masyarakat Adat sering mengalami eksplorasi, ketika bahasanya dipakai dalam penelitian atau proyek teknologi tanpa persetujuan.

***Masyarakat Adat Suku Balik di Pemaluan bercengkrama (dengan menggunakan Bahasa Balik) saat beristirahat di Pondok Ladang, percakapan informal seperti ini adalah transformasi pengetahuan & bahasa yang efektif untuk menjaga lestarinya Bahasa Suku Balik.***

*Sumber Foto : Tim Mini Ensiklopedia Masyarakat Adat Suku Balik*



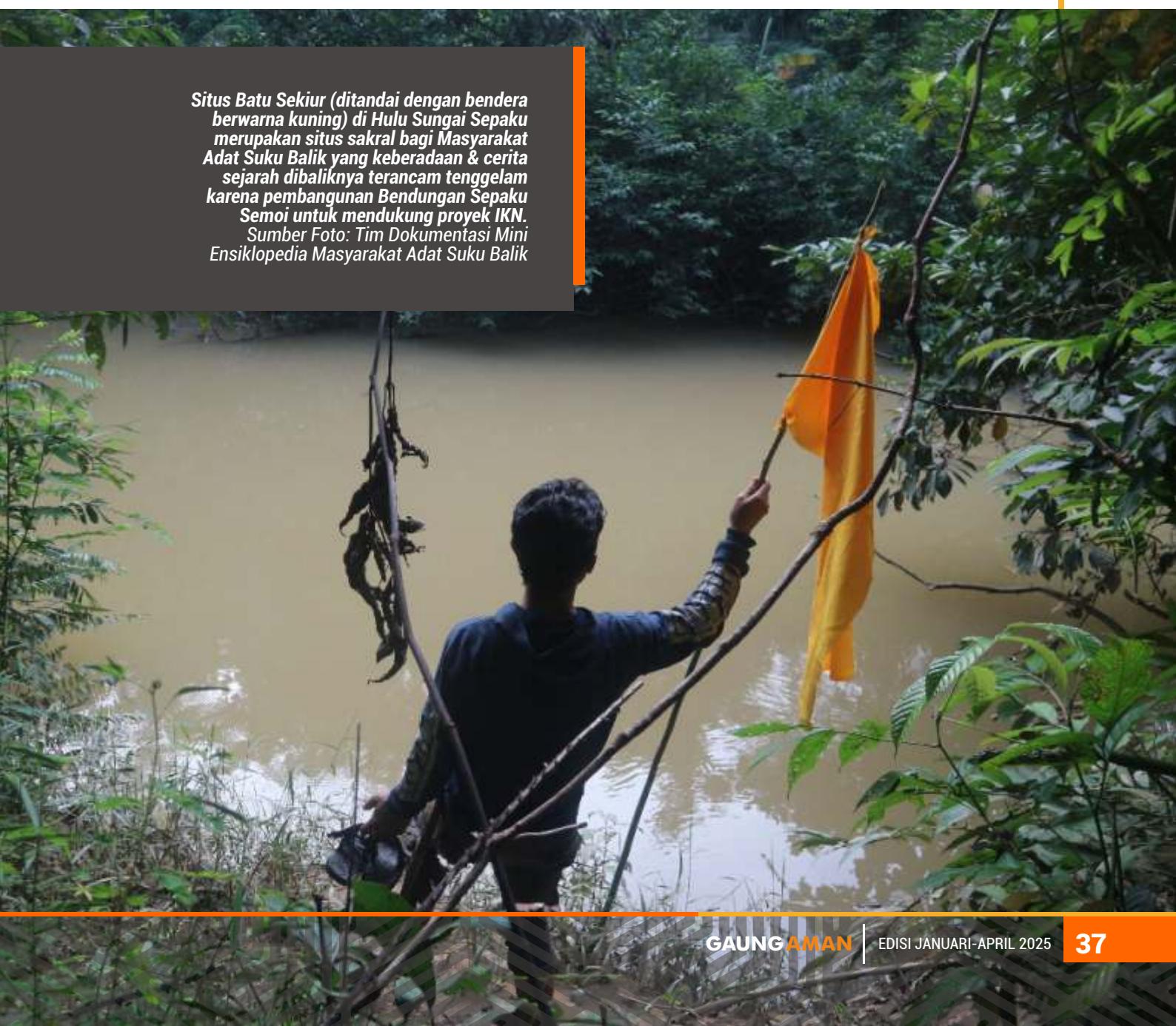


### Mendorong Pemanfaatan Teknologi Bahasa yang Berkeadilan

Untuk memastikan bahwa teknologi bahasa benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat Adat, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, meluaskan akses internet bagi komunitas adat. Agar keterlibatan Masyarakat Adat bisa terwujud; dan pemanfaatan teknologi bahasa bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.

Kedua, mendukung kebijakan pelestarian bahasa ibu, termasuk pendanaan untuk proyek dokumentasi dan pengembangan teknologi bahasa. Inisiatif berbasis komunitas, seperti kamus digital, aplikasi pembelajaran bahasa, dan proyek dokumentasi, harus diperluas.

**Situs Batu Sekiur (ditandai dengan bendera berwarna kuning) di Hulu Sungai Sepaku merupakan situs sakral bagi Masyarakat Adat Suku Balik yang keberadaan & cerita sejarah dibaliknya terancam tenggelam karena pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk mendukung proyek IKN.**  
Sumber Foto: Tim Dokumentasi Mini Ensiklopedia Masyarakat Adat Suku Balik





Ketiga, melibatkan Masyarakat Adat dalam pengembangan teknologi bahasa, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pencipta dan pemilik bahasa itu sendiri. Keempat, menjunjung tinggi etika dalam penggunaan data bahasa ibu. Setiap proyek harus dilakukan dengan persetujuan komunitas, serta memastikan manfaat yang adil.

Pada akhirnya, teknologi bisa menjadi alat ampuh untuk melestarikan bahasa ibu, tetapi bukan jawaban tunggal. Keterlibatan aktif Masyarakat Adat menjadi kunci agar teknologi benar-benar bermanfaat.

**Pemuda Adat Suku Balik sedang beristirahat di Tangke (Sungai: dalam Bahasa Balik) saat melakukan pemetaan & dokumentasi pengetahuan Masyarakat Adat Suku Balik.**  
Sumber Foto : Tim Mini Ensiklopedia Masyarakat Adat Suku Balik



## Kedang Ipil: Tuan Rumah Rakernas AMAN VIII

Oleh: Hairuddin Alexander,  
Kader AMAN Kaltim.



**Pemuda Adat Kedang Ipil membawakan Tarian menanam padi untuk menyambut tamu Festival Budaya Kutai Adat Lawas "Nutuk Beham".**

Sumber foto: Dokumentasi Pemda Kukar.

**K**edang Ipil, sebuah desa yang terletak di komunitas Masyarakat Adat Sumping Layang, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur akan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN VIII pada 14-16 April 2025.

Kepala Desa Kedang Ipil, Kuspawansyah menyatakan sudah siap dengan hajatan besar ini. Ia pun menegaskan bahwa Kedang Ipil akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk mensukseskan pelaksanaan Rakernas AMAN VIII.

"Kami siap mensukseskan Rakernas AMAN VIII," katanya sembari menambahkan selaku perangkat desa sudah menyampaikan informasi kegiatan Rakernas AMAN ini kepada masyarakatnya.

Kuspawansyah menuturkan secara umum Masyarakat Adat Kedang Ipil menyambut baik kegiatan Rakernas ini. Ia mengakui Kedang Ipil belum sempurna sebagai lokasi kegiatan nasional, namun mereka akan menyuguhkan yang terbaik untuk mendukung kelancaran Rakernas AMAN.



"Kami berharap peserta Rakernas AMAN memaklumi keadaan kami di desa," pintanya.

Kuspawansyah menerangkan selama pelaksanaan Rakernas AMAN nanti, seluruh peserta akan menginap di rumah penduduk. Dikatakannya, masyarakat di Kedang Ibil sudah bersedia rumahnya dijadikan sebagai tempat tinggal peserta Rakernas AMAN.

Sementara untuk makan peserta, kita akan siapkan dapur umum lengkap dengan peralatan masak di Balai Adat yang bisa menampung ratusan orang.

"Semua fasilitas ini sudah kami sampaikan ke panitia Rakernas AMAN yang sudah melakukan survei ke Kedang Ibil," terangnya.

Kuspawansyah menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan terkait kegiatan Rakernas AMAN ini. Menurutnya, pemerintah Kecamatan sangat senang dengan adanya kegiatan Rakernas AMAN di Kedang Ibil.

"Pada intinya, masyarakat disini sudah siap. Fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan Rakernas nanti juga sudah memadai," ujarnya sembari berharap Rakernas AMAN nanti membawa dampak positif terkait perlindungan Masyarakat Adat dan kelestarian adat budaya di Kedang Ibil.

Tokoh Masyarakat Adat Kedang Ibil, Tajudin Nur menyambut baik pelaksanaan Rakernas AMAN di Kedang Ibil. Pria yang akrab dipanggil Ben'jol ini mengatakan Rakernas AMAN merupakan momentum penting bagi Masyarakat Adat di Indonesia, khususnya bagi kami di Komunitas Masyarakat Adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang, Desa Kedang Ibil, Kabupaten Kutai Kartanegara. Disebutnya, kegiatan ini menjadi wadah bagi Masyarakat Adat untuk bersatu, berdiskusi dan mengambil keputusan strategis guna memperkuat hak-hak dan kedaulatan Masyarakat Adat.

"Kami sangat bangga dan senang sekali Rakernas AMAN dilaksanakan di Komunitas Masyarakat Adat kami. Semoga dengan kegiatan ini menjadikan Masyarakat Adat anggota AMAN dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan lembaga Internasional," paparnya.



**Perempuan Adat Kedang Ibil menyambut tamu Festival Budaya Kutai Adat Lawas "Nutuk Beham".  
Sumber foto: Andre/AMAN Kaltim.**



### Dukungan dari Lapisan Masyarakat

Kegiatan Rakernas AMAN di Kedang Ipil mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya perwakilan pemuda adat dari Komunitas Masyarakat Adat Sumping Layang di Kedang Ipil, Regina Novi Yanti.

Novi menilai Rakernas AMAN di Kedang Ipil sangat strategis. Selain akan memberi manfaat bagi masyarakat di Kedang Ipil, Rakernas juga bisa menjadi ajang pertemuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah.

"Dari mereka, kami bisa belajar supaya bisa meningkatkan kesadaran untuk melestarikan adat budaya di Kedang Ipil," kata Novi yang akrab disapa Kapoy.



**Tetua Adat Kutai Adat Lawas Kedang Ipil.**  
Sumber foto:  
Andre/AMAN Kaltim.

### Mempertegas Eksistensi Komunitas Masyarakat Adat

Ketua Dewan AMAN Wilayah Kalimantan Timur Margaretha Seting yang juga Steering Committee (SC) Rakernas AMAN VIII menerangkan dipilihnya Komunitas Masyarakat Adat Sumping Layang di Kedang Ipil sebagai lokasi Rakernas AMAN VIII untuk mempertegas eksistensi komunitas Masyarakat Adat ini. Sebab, komunitas ini terisolir dan dikepung oleh investasi.

"Situasi ini ancaman terbesar buat mereka. Sekarang, komunitas Masyarakat Adat Sumping Layang ini sedang memperjuangkan pengakuan hak Masyarakat Adat dari pemerintah agar ke depannya adat istiadat budaya mereka terlindungi, termasuk hak-hak Masyarakat Adat," kata Margaretha Seting.

Diterangkannya, Kedang Ipil saat ini telah menjadi desa budaya, salah satu desa tujuan wisata karena masyarakatnya mempertahankan adat istiadat dan kearifan lokal. Adat istiadat menjadi kekayaan mereka. Melalui kegiatan Rakernas ini, banyak orang akan menikmati kekayaan tradisional yang ada di Kedang Ipil. Sehingga, tujuan Kedang Ipil menjadi destinasi wisata bukan hanya untuk kebutuan ekonomi, tapi masyarakatnya ingin berbagi agar orang lain bisa memahami, mendalami dan menikmati hasil kekayaan tradisional mereka.

"Kita ingin, di Rakernas nanti orang bisa melihat "kekuatan" Masyarakat Adat di Kedang Ipil menjadi sebuah resiliensi, daya tahan masyarakatnya menghadapi gempuran investasi dan berbagai program yang bisa menghancurkan adat istiadat budaya. Tapi, kami tetap bertahan," ungkapnya.



## Sona: Perempuan Adat Talang Mamak yang Menuntut Keadilan

Oleh : Nuskan Syarif,  
Jurnalis Masyarakat Adat dari Indragiri Hulu, Riau.

**D**i tengah bentang alam Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, hidup seorang perempuan adat tangguh bernama Sona binti Kulumpat. Ia adalah sosok ibu dan petani yang berdedikasi untuk keluarganya dan komunitasnya. Terlahir pada 28 Mei 1971, Sona telah menjalani hidup sebagai seorang perempuan adat Talang Mamak yang bergantung pada praktik berladang berpindah, metode tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya.

Sebagai tulang punggung keluarga, Sona dan suaminya, Nasrun, mengandalkan hasil ladang seluas satu hektar untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ladang tersebut ditanami padi, sayuran, cabai, serta bumbu dapur lainnya yang menjadi sumber pangan utama bagi keluarga mereka. Namun, keberlanjutan hidupnya kini terancam oleh ketidakadilan hukum yang menimpanya.



**Sona, Perempuan Adat Talang Mamak yang dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pembakaran hutan & lahan didampingi oleh penasihat hukum dari PPMAN.**  
Sumber Foto : Dokumentasi PPMAN.



### Potret Ketidakadilan Bagi Masyarakat Adat

Beberapa waktu lalu, Sona ditetapkan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Rengat dengan tuduhan pembakaran hutan dan lahan di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Padahal, aktivitas berladang yang dilakukan oleh Sona adalah praktik agraris yang telah menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Adat Talang Mamak sejak lama. Sayangnya, tanpa mempertimbangkan kearifan lokal dan kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak Masyarakat Adat, aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadapnya.

Ketika berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rengat, tidak ada pendekatan hukum yang mempertimbangkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Akibatnya, Sona harus menghadapi proses hukum yang tidak berpihak kepada dirinya dan komunitasnya.

Pada 27 Agustus 2024, Sona resmi ditahan oleh Polres Rengat. Kini, ia menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor perkara 389/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntutnya dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu bulan kurungan. Tuntutan ini dianggap tidak adil mengingat tidak ada saksi yang melihat langsung Sona melakukan pembakaran lahan secara ilegal.



**Proses Sidang Pengadilan Kasus Sona di PN Rengat, Indragiri Hulu, Riau.**  
Sumber Foto : Dokumentasi PPMAN.



**Sona duduk disamping penasehat hukum dalam Proses Persidangan di PN Rengat, Indragiri Hulu, Riau.**  
Sumber Foto : Dokumentasi PPMAN.

### Dampaknya Bagi Keluarga Sona

Sejak penahanannya, kondisi keluarga Sona semakin terpuruk. Ketujuh anaknya menjadi terlantar karena kehilangan sosok ibu yang biasanya mengurus rumah dan kebutuhan mereka. Sang suami, Nasrun, yang sebelumnya telah mengalami ancaman dan kekerasan oleh kelompok tertentu, kini semakin terpuruk secara mental dan fisik. Ia bahkan pernah ditembak dengan senapan rakitan oleh seseorang bernama Herlan dan kelompoknya, menyebabkan dirinya mengalami cedera serius.

Selain beban emosional, kondisi ekonomi keluarga juga memburuk. Anak-anak Sona yang masih bersekolah di luar desa, seperti di Air Molek dan Bekasi, kini kesulitan melanjutkan pendidikan mereka. Ladang yang menjadi sumber penghidupan keluarga kini terbengkalai tanpa Sona yang mengelolanya.

### Tidak Sesuai Fakta Persidangan

Tim hukum dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), yang dipimpin oleh Indra Jaya, mengungkap tuduhan terhadap Sona tidak sesuai dengan fakta persidangan. Tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan bahwa Sona melakukan pembakaran lahan secara langsung. Indra menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan negara dan hak-hak Masyarakat Adat.

"Bagaimana mungkin seseorang dituduh membakar lahan jika tidak ada saksi yang melihatnya?" ujarnya pada 28 Februari 2025.

Indra menambahkan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan adat seperti Sona, bukan malah mengkriminalisasi praktik pertanian yang telah menjadi bagian dari tradisi komunitas mereka.



### Sona Harus Dibebaskan

Saat mendengar tuntutan satu tahun penjara yang diajukan jaksa, Sona hanya bisa tertunduk sedih. Air mata mengalir di wajahnya, mencerminkan ketidakberdayaan seorang perempuan adat yang harus menghadapi hukum yang tidak berpihak kepadanya. Dengan suara bergetar, ia hanya bisa bertanya, "Apa salahku sehingga harus dituntut satu tahun penjara?"

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Indragiri Hulu melalui Ketua Pelaksana Hariannya, Gilung, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga Sona mendapatkan keadilan. Mereka menilai bahwa Sona tidak pantas diberat hukum hanya karena menjalankan tradisi berladang yang telah diwariskan oleh leluhurnya.

"Demi keadilan, Sona harus dibebaskan. Dia tidak bersalah," tegas Gilung.

Kisah Sona adalah potret nyata ketidakadilan yang masih dialami Masyarakat Adat di Indonesia. Kriminalisasi terhadap praktik agraris tradisional yang telah berlangsung turun-temurun menjadi bukti bahwa kebijakan negara belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak Masyarakat Adat. Kini, komunitas adat dan berbagai pihak terus mendesak pembebasan Sona agar ia dapat kembali kepada keluarganya dan melanjutkan kehidupan sebagai perempuan adat yang tangguh.

Perjuangan Sona bukan hanya perjuangan seorang ibu dan petani, tetapi juga perjuangan bagi seluruh Masyarakat Adat yang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak tradisional mereka.



*Sona dikawal & didampingi proses persidangannya oleh PPMAN & Pengurus AMAN Daerah Indragiri Hulu, Riau.*  
Sumber Foto : Dokumentasi PPMAN.



## Menjaga Wilayah Adat, Merawat Pengetahuan, Melawan Ketidakpastian

**M**eski angin masih membawa kabar nir-perubahan di bawah rezim Prabowo-Gibran. Hidup harus terus berjalan, dan perjuangan mesti berlanjut.

Oleh: Tim Infokom PB AMAN

Masyarakat Adat di mana pun tetap menjaga dan memastikan kedaulatan wilayah adat. Di tingkat nasional, AMAN bersama koalisi terus berjuang menggolkan RUU Masyarakat Adat. Sementara itu, di tingkat tapak, Masyarakat Adat juga menjaga kedaulatan wilayahnya dengan memastikan sistem pengetahuan tetap hidup: bercocok tanam, bertani, bergotong royong saat panen, dan bermusyawarah.

*Sekjen AMAN, Rukka Sombolingo memberikan pidato sambutan pada perayaan HKMAN dan 26 tahun AMAN, di Rumah AMAN Sempur, Bogor.*  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





**Perempuan Adat Batin Beringin Sakai  
berangkat berladang.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



*Perenpuan Adat Bayan sedang menujak (memisahkan padi dari kulitnya) dengan menggunakan Lisung (Lesung).*  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





**Perempuan Adat sedang berdiskusi.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





**Ritual Adat Kendurai Agung Rejang Lebong.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



**Masyarakat Adat di Rejang Lebong Memanen  
Kopi yang ditanam di Wilayah Adatnya.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



***Komunitas Masyarakat Adat Dangiang,  
Garut bergotong royong memanen padi.***

Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





*Pemasangan Plang Hutan adat berdasarkan Putusan MK35 di Komunitas Masyarakat Adat Aek Godang Tornauli, Tano Batak, Sumatera Utara.  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*





**Seorang perempuan Adat Kasepuhan Karang, Banten sedang membersihkan gulma di sawah.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



**Transfer pengetahuan pembuatan atap rumah di sekolah adat Pesinauan, Osing.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



**Masyarakat Adat Kutai Adat Lawas (Sumping Layang Kedang Ipil) menyiapkan Ritual Nipalah Nebang (ritual menebang pohon besar untuk membuka ladang - meminta berkat keselamatan dari leluhur untuk selama proses penebangan).**

Sumber Foto : Romasta BR Simbolon & Wedi / Sajogjo Institute .





**AMAN & Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat berfoto bersama pasca audiensi dengan BPIP, tentang urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



**AMAN Bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat melakukan Media Briefing ke Kompas Group berkaitan dengan nasib RUU Masyarakat Adat yang telah mangkrak belasan tahun.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



<i>Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019</i>		<b>504.184.783,76</b>
<b>Tanggal Penerimaan</b>	<b>Donor</b>	<b>Jumlah</b>
20 April 2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4 Mei 2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23 Juni 2020	Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
10 Juli 2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18 September 2020	Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
27 Oktober 2020	IFAD	33.960.000,00
16 Desember 2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24 Februari 2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12 April 2021	CLUA	68.122.729,00
27 Juli 2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13 Agustus 2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25 Agustus 2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10 September 2021	CLUA	52.968.750,00
22 Oktober 2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
8 November 2021	Packard	5.659.759.450,00
29 Juni 2022	Skoll	171.250.000,00
5 Juli 2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315,00
17 Oktober 2022	Pawanka Wayfinder	756.250.000,00
14 Desember 2022	Tenure Facility	498.244.499,00
14 Maret 2023	Skoll	866.000.000,00
14 Maret 2023	Ballmer	2.238.445.800,00
20 September 2023	Wikimedia	73.994.450,00
6 Desember 2023	Tenure Facility	516.069.260,00
31 Januari 2024	Clarifi	150.000.000,00
3 April 2024	Silicon Valley	29.777.000,00
29 April 2024	Nia Tero	18.750.000,00
13 September 2024	Matata	3.000.000,00
19 Oktober 2024	Tenure Facility	582.687.360,00
13 September 2024	Pawanka	19.250.000,00
13 Januari 2025	NDI Tahap 2	61.625.000,00
<b>Total Dana ER AMAN</b>		<b>17.838.006.047,76</b>
<b>Pengeluaran per 28 Februari 2025</b>		<b>12.779.776.114,60</b>
<b>Sisa dana menurut bank Per 28 Februari 2025</b>		<b>5.058.229.933,16</b>
Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain		

**LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAP DARURAT/  
EMERGENCY RESPOND (ER)  
ALIANSI MASYARAKAT  
ADAT NUSANTARA**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 28 FEBRUARI 2025**  
**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA**

Penerimaan Donor	Jumlah
The Tenure Facility	3.235.999.044,65
NICFI	6.621.187.854,10
SKOLL Award	4.996.136.618,95
OSF - AMAN	383.626.840,45
CLUA - FPCI	30.514.136.381,00
CLUA - Michigan	726.422.336,00
Silicon Valley	520.519.524,28
Thousand Currents	660.448.899,00
Nia Tero Foundation	504.134.656,08
NDI	453.767.913,69
Pawanka Wayfinders	805.975.875,00
The Christensen Fund	1.579.731.400,00
<b>Saldo</b>	<b>51.002.087.343,20</b>
<b>Dana Iuran dan Sumbangan-sumbangan</b>	
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	261.672.458,13
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	91.649.244,90
<b>Dana Organisasi per 28 Februari 2025</b>	
Kas	10.000.000,00
KMAN VII	550.000.000,00
Dana Organisasi	4.124.689.383,00
Dana Resiliency	2.802.214.684,00
Dana Tanggap Darurat	5.058.229.933,16



**Laporan Iuran Komunitas Masyarakat Adat  
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Maret 2023 - Maret 2025**

Komunitas Masyarakat Adat	Iuran	Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
JUHU	240.000	KENABUNG	120.000
SUKU BALIK SEPAKU	120.000	CONGKONG BARU	120.000
PATONGLOAN	120.000	MENYUMBUNG	120.000
BALAI MALANGKAYAN	120.000	SEPANGGANG, BOTUNG KERAMAT SINGA PITING	120.000
DAYEQ JUMETN TUWOYATN	360.000	LAMAN RIAM DADAP	120.000
PAYAKNG OLAU SULIKNG	240.000	LAMAN SEKUKUN	120.000
DAYEQ MUARA MADEKNG	120.000	PANCUR KRAMAT	120.000
KAMPONG BARAS JIRING / DAS KENDILO	120.000	TAPAK'NGTIGA TABULIT'N SEBATAK'NG LAMAN MARIANGIN	120.000
TUNAN/DAS TUNAN	120.000	DAYAK JOKAK SEKAYUK	120.000
ADAT PANGI	120.000	DESA GEMA	120.000
BOENG HELEWORURU	120.000	SIMPANG DUA	120.000
MARGO SUMAY	500.000	DAYAK KUALAN	120.000
PAJEKO	72.000	DAYAK SEMANAKNG	120.000
TUKAN HOKENG	120.000	BENUA SIMPANG SEMANDANG KANAN	120.000
MATAUE	120.000	BALAI ADAT MA'ABAI	120.000
TATAR KOWENK	240.000	BALAI ADAT HARUYAN	120.000
FERINBOTAM	120.000	BALAI ADAT KADAYANG	120.000
GANABAY	120.000	BALAI ADAT URUI	120.000
BALAI TAMUNIH	1.200.000	BALAI ADAT SUNGAI BINTI	120.000
TALOKO	120.000	BALAI ADAT WARIYUNG	120.000
SANDUE	120.000	BALAI SISIRIN	120.000
KORO	120.000	TALANG MAMAK SIMARANTIHAN	120.000
KABORO	120.000	DEMUNG PAPAK	120.000
NAGA LA HAMI	120.000	JURIT	120.000
KOLA	120.000	BAGIK PAYUNG	120.000
KUMUL	120.000	BANGKAL	120.000
LARAT	240.000	BATU WANGI	120.000
LUTUR	120.000	DUKUH	120.000
NEGERI AKOON	120.000	SANCANG	120.000
NEGERI AMETH	120.000	GOLO LINUS	240.000
NEGERI HARUKU	120.000	TELUK BETUNG	120.000
NEGERI PAPERU	120.000		
KANCIKGH	120.000		
MARGO VII KOTO	240.000		



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran	Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
KRAMAT ADAT SEMBALUN BUMBUNG	120.000	TABERA RATEWANA	120.000
TO KARONSIE	120.000	UMBU PABAL	120.000
BALAI JUHU	1.440.000	MASUKIH	120.000
ADOLANG	240.000	MA'ANYAN PAMANGKA	120.000
PADOE	480.000	RAKYAT PENUNGGU KAMPONG BATU GAJAH	120.000
KUTAI CAWANG AN	240.000	NEGERI SAMED	120.000
BAROKO	600.000	NEGERI ULATH	120.000
KARAMPUANG	120.000	NEGERI WASSU	120.000
BARAMBANG KATUTE	120.000	NGAIGULI	120.000
SOPPENG	120.000	REBI	120.000
KAMPALA	120.000	SIYA	120.000
PATTIRO TOA	120.000	SIYA	120.000
DAYAK TAMAN MERAGUN	120.000	NATUMINGKA	240.000
DAYAK TAMAN SUNSONG	120.000	SIMENAHENAK	120.000
KUTAI LUBUK KEMBANG	240.000	BALEPE'	240.000
BAMBAPUANG	240.000	BALLA	240.000
SEGURING (SELUPU REJANG)	120.000	BALUSU	240.000
KALUPPINI	360.000	BANGA	240.000
TUMBANG KORIK	240.000	BAU	240.000
TUMBANG LANGGAH	120.000	BITTUANG	240.000
BULAGI	120.000	BUAKAYU	240.000
SABANG	120.000	BUNTAO	240.000
SAMPEKONAN	120.000	DENDE	240.000
SEANO	120.000	KESU'	240.000
LOLANTANG	120.000	KURRA	240.000
TEWAH	120.000	MADANDAN	240.000
TANJUNG JARIANGAU	120.000	MAKALE	240.000
BURANGAS	280.000	MALIMBONG	240.000
POSANGKE	240.000	MAPPA'	240.000
KAJUMARANGKA	240.000	MENGKENDEK	240.000
LALAEQ	240.000	NANGGALA	240.000
BONAN DOLOK DEBATARAJA	120.000	PALESAN	240.000
TO RAHAMPU'U	240.000	PALI	240.000
TUMBANG MALAHOI	360.000	PANGALA'	240.000
KABHIHU WAIRASA	120.000	PIONGAN	240.000
WAIMANU/TAUPOPU	120.000	RANO	240.000
TAMENYAL	120.000	RANTEBUA	240.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran	Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
SA'DAN	240.000	ORANG KALIS MANDAI	120.000
SANGALLA'	240.000	DAYAK EMBALOH DAS LEBOYAN	120.000
SE'SENG	240.000	HENGKUNG KAYA'AN MENDALAAM	120.000
SIMBUANG	240.000	TAMAMBALO BENUA UJUNG	120.000
TALION	240.000	KETEMENGGUNGAN TAMAN BANUA SIO	360.000
TAPPARAN	240.000	TAMAN KAPUAS YANDUNGE	360.000
TIKALA	240.000	PUNAN UHENG KREHO NANGA ENAP	360.000
TONDON	240.000	DAYAK IBAN SUI.UTIK	360.000
ULUSALU	240.000	DAYAK IBAN NANGA KANTUK EMPANANG	360.000
TUMBANG BAHANEI	360.000	MELAYU SELIMBAU	360.000
TEHANG	240.000	DAYAK IBAN MUNGGUK	360.000
BUNTOK	120.000	DAYAK IBAN SEI. TEBELIAN	360.000
TO TAMBEE	120.000	DAYAK IBAN LAUK RUGUN	360.000
BAIPITO	240.000	DAYAK IBAN APAN	360.000
SEGALE ANYAR PAER PUJUT	240.000	DAYAK IBAN PULAN	360.000
OSING ALIYAN	240.000	DAYAK IBAN UNGAK	360.000
OSING ALAS MALANG	240.000	DAYAK TAMAMBALO KERANGKANG	360.000
OSING BAKUNGAN	240.000	KETEMENGGUNGAN TAMAMBALOH APALIN	360.000
OSING KEMIREN	120.000	TONDON	360.000
OSING MONDOLUKO	120.000	KALUPINI	360.000
OSING OLEHSARI	120.000	PATONGLOAN	120.000
OSING ANDONG	120.000	TANGSA	120.000
OSING KENJO	240.000	KASEPUHAN KARANG	240.000
OSING BONYOLANGU	240.000	TANJUNG KARANG	240.000
OSING KEJOYO TAMBONG	600.000	KARAMPUANG	120.000
OSING MACAN PUTIH	120.000	TIDUNG SEMBAKUNG	120.000
OSING CUNGKING	120.000	TIDUNG SEBUKU	120.000
OSING JOPURO	120.000	TIDUNG SEBATIK	120.000
OSING BANJAR	120.000	TIDUNG SEIMENGGARIS	120.000
OSING GLAGAH	120.000	TIDUNG BINUSAN	120.000
OSING DUKUH KOPEN KIDUL	120.000	TIDUNG ATOB	120.000
MINJARA LAROMPONG	840.000	TIDUNG MANSALONG	120.000
OMPU UMBAK SIALLAGAN DOLOK PARMONANGAN	120.000		
SUKU MAIRASI	120.000		
DAYAK IBAN PERBATASAN BADAU	120.000		
DAYAK SURUK SUNGAI PUTIH	120.000		
		<b>TOTAL</b>	<b>41.532.000</b>



**Laporan Iuran Komunitas Masyarakat Adat  
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**  
Januari - Desember 2024

Komunitas Masyarakat Adat	Iuran	Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
BALAI MAGALAU	600.000	KANARI	120.000
LEWU TUMBANG MALAHOI	120.000	LALA	120.000
LOWU TUMBANG MASUKIH	120.000	LANTIBUNG	120.000
LEWU SEPANG KOTA	120.000	SABOBOK	120.000
LEWU TUMBANG JUTUH	120.000	TABULANG	120.000
LEWU TUMBANG RAHUYAN	120.000	TADUNO	120.000
LOWU MANGKUHUNG	120.000	TOGONG SAGU	120.000
LOWU TUMBANG NAPOI	120.000	DUNGKEAN	120.000
LEWU TUMBANG BARINGEI	120.000	LIPU LAALO	120.000
LEWU LANGGAH	120.000	BULUSU TALAH	120.000
BALAI TAMUNIH	600.000	BULUSU ALUNG	500.000
TUMBANG BAHANEI	120.000	ADAT LOBU SUNUT NAGA PADOHA MANALU RUMA IJUK	240.000
URI	120.000	LAWODAKERI	120.000
AMBOAN	120.000	KABHIHU MURITANA MAMBORO	120.000
LIMBONG	120.000	ADAT HONO	120.000
KANANDEDE	120.000	ADAT TURONG	120.000
KOMBA	120.000	ADAT LODANG	120.000
MINANGA	120.000	ADAT SINGKALONG	120.000
MANGANAN	120.000	ADAT AMBALLONG	120.000
BALANNALU	120.000	ADAT POHONEANG	120.000
KAWALEAN	120.000	ADAT HOYANE	120.000
SALURANTE	120.000	ADAT KARIANGO	120.000
PONGLEGEN	120.000	ADAT BEROPPA	120.000
LOWARANG	120.000	BALAI SALANG'AI	120.000
PONGTATTU	120.000	ADAT MA'ANYAN	120.000
KALOTOK NASE	120.000	MEKA-MUNGKUR	120.000
KASEPUHAN CIHERANG	460.000	MUNGKUR GETCIH	120.000
BALAI SUMBAI	240.000	MUNGKUR LAE MAGA	120.000
BALAI SAMIHIM	600.000	MUNGKUR RAMBUNG BENCARIR	120.000
MALEMPAK	120.000	MUNGKUR SITANDUK	120.000
PATTALASANG	120.000	BUNTOK	120.000
SUKA	120.000	DAYEQ MURAI	120.000
BULUTANA	120.000	PARENG NAPU	120.000
BONE-BONE	120.000		



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran	Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
PASER MIGI KASUNGAI	120.000	TANAK SEMBALUN	120.000
MURU	120.000	KEMANGKUAN SEMBALUN	120.000
LEMBOK	120.000	KEMANGKUAN ADAT TANAK SEMBALUN	120.000
KASEPUHAN BAYAH	120.000	ADAT SAJANG	120.000
ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN	120.000	DASAN BILOK	120.000
ADAT DALEM TAMBLINGAN CATUR DESA	120.000	ADAT DASAN KEBAR	120.000
ADAT TIGAWASA	120.000	ADAT PARANTA	240.000
ADAT PEDAWA	120.000	LARAT (URTATAN)	120.000
ADAT CATUR	120.000	KORATUTUL	120.000
DESA ADAT LES	120.000	WOWONDA	120.000
DESA ADAT PACUNG	120.000	URTATAN	240.000
SALU TEPA	120.000	BAMBAPUANG	120.000
BENUAQ LAWA	120.000	SANGGAR/KORE	120.000
GALESONG	120.000	SANDUE	120.000
DAYAK SEBERUANG (TEMPUNAK)	240.000	TALOKO	120.000
SUNGAI ANTU	240.000	KETIMANGGONGAN BINUA SAMIH II	120.000
RENTONG	240.000	JAWETEN	120.000
KAMBONG	240.000	OI BURA	120.000
NANGA MAU	240.000	NGUWU PONDA	120.000
LEBUK BUYU	240.000	KATUPA	120.000
KUJAU	240.000	TANJUNG KARANG	120.000
SUNGAI MANAN	240.000	GENGGELANG	120.000
BEBEKEK	120.000	PEMARU	120.000
KARAENG BOSSOLO	120.000	KARANG BAJO	120.000
SANEO	120.000	KARAENGBARU	120.000
LEPADI	120.000	SIMENAKHENAK	240.000
KANDAI SATU	120.000	KENYALA	120.000
BUMI PAJO	120.000	DEPATI RENCONG TELANG	120.000
BENUAQ OHOKNG SANGONKG	120.000	DEPATI BIANG SARI	120.000
KERAMAT ADAT SEMBALUN BUMBUNG	120.000	LIMO HIANG	120.000
KERAMAT ADAT SEMBALUN LAWANG	120.000	DEPATI INTAN	120.000
GAWAR KEMALIK GUNUNG SELONG	120.000	DEPATI PUNCAK NEGERI	120.000
ADAT TIMBA GADING	120.000	DEPATI PAYUNG	120.000
		BUKIT SEMBAYANG	120.000
		BUKIT TINGGI	120.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran	Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
NENEK 4 BETUNG KUNING	120.000	OSING OLEHSARI	360.000
KOTO DIAN	120.000	OSING ANDONG	360.000
TO TAMBEE	120.000	OSING KENJO	360.000
PEJANGGIK	240.000	OSING BOYOLANGU	360.000
MANTANG	240.000	OSING KEJOYO TAMBONG	360.000
SEGALA ANYAR	240.000	OSING MACANPUTIH	360.000
JELANTIK	240.000	OSING CUNGKING	360.000
LANGKO	240.000	OSING REJOPURO	360.000
DAYAK JOKAK SEKAYUK	120.000	OSING BANJAR	360.000
REMBITAN	120.000	OSING GLAGAH	360.000
PRAYA BARAT DAYA	120.000	OSING DUKUH KOPEN KIDUL	360.000
LOWU TUMBANG KORIK	120.000	OSING BANJAR	120.000
TOGIAN	240.000	MONDOK	120.000
BOBONGKO	240.000	TARLAWI	240.000
RAKYAT PENUNGGU KAMPONG KWALA BEGUMIT	600.000	PIRI TA'A	240.000
KOMBA LAROMPONG	120.000	BORO	120.000
PUNAN UHENG KEREHO	120.000	SAMBORI	120.000
DAYAK TAMAMBALOH BANUA TAMAO	120.000	KAOWA	120.000
SUNGOLO	120.000	BADUY	120.000
BANUA APALIN	120.000	KASEPUHAN CITOREK	120.000
BANUA NANGA NYABO	120.000	KASEPUHAN URUG	120.000
MALIMBONG	840.000	KASEPUHAN KARANG	120.000
KALUPPINI	120.000	KASEPUHAN PASIR EURIH	120.000
RANTEBULAN	120.000	KASEPUHAN CIBEDUG	120.000
ADAT BUNTU MATABING	120.000	KASEPUHAN CICARUCUB	120.000
MEKAR SARI	120.000	KASEPUHAN CISUNGSAH	120.000
TAMIANG LAYANG	120.000	KASEPUHAN CISITU	120.000
BARAS JIRING	120.000	KASEPUHAN CIHERANG	120.000
LUMBIS OGONG DESA TADUNGUS	120.000	KASEPUHAN CIPTAMULYA	120.000
TANJUNG JARIANGAU	120.000	KASEPUHAN SINAR RESMI	120.000
OSING ALIYAN	360.000	KASEPUHAN GELAR ALAM	120.000
OSING ALASMALANG	360.000	KASEPUHAN LEBAK LARANG	120.000
OSING BAKUNGAN	360.000	HUTAGURGUR	120.000
OSING KEMIREN	360.000	SAMPEAN	120.000
OSING MANDALUKO	360.000	BATUNAGODANG	120.000
		AEK NAULI	120.000
		SOSOR TAMBOK	120.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
MATITI	120.000
MINANGANDALA	120.000
RANGA RANGA	120.000
ETENG	120.000
SIMPANGAN	120.000
TAUGI	120.000
TANGEBAH	120.000
TINONDA	120.000
BINOTIK	120.000
BATIN USUL	120.000
ULATH	120.000
PAPERU	120.000
AKOON	120.000
HARUKU	120.000
AMETH	120.000
ROHOMONI	120.000
KABAUW	120.000
BOOI	120.000
SIR ISORI AMAPATY	120.000
PELAIK KERUAP	120.000
DAYAK LIMBAI MENUKUNG	120.000
DAYAK LIMBAI ELLA	120.000
DAYAK RANSA	120.000
MENUKUNG NANGA SIYAI	120.000
DAYAK ELLA	120.000
DAYAK PANGIN	120.000
DAYAK KENYILU	120.000
DAYAK KEBAHAN	120.000
<b>Total</b>	<b>38.040.000</b>



**Laporan Iuran Komunitas Masyarakat Adat  
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Januari - Februari 2025**

Komunitas Masyarakat Adat	Iuran
MARIA	120.000
TUMBANG BAHENEI	120.000
BUWONO ONE	120.000
SERAWAI SEMIDANG SAKTI	120.000
SERAWAI PASAR SELUMA	120.000
KUTEI LUBUK KEMBANG	120.000
TOBOLOI	360.000
<b>Total</b>	<b>1.080.000</b>



**Laporan Iuran Kader Masyarakat Adat  
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Maret - Desember 2023**

Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Antonius Antong	120,000	Engkos Kosasih	312,000
Yohanes	360,000	Pahruddin	120,000
Mardani	48,000	Karto Yos Prikarno Pardosi	120,000
Taufik Haderani	48,000	Meiliana Yumi	48,000
Nelson	48,000	Herlina Sinta	120,000
H. Iskandar	24,000	Jhon Bala	120,000
Yosi Samban	120,000	Samuel Purba	48,000
Suryadi	120,000	Popong Lia Lisnawati	72,000
Hardiansyah	24,000	Lili Herdiana	120,000
Rufinus	120,000	Yayan Hermawan	120,000
Denny Nestafa T.	120,000	Rukmini P. TOHEKE	48,000
Sahliwan	120,000	Yonas Mantaelly	48,000
Ruby	35,000	Hayati A. DAUD	120,000
Sahrianto S. Sos	120,000	Muhlis	48,000
Hermanus	126,000	Made Amin	48,000
Erwin	24,000	Yulianus	120,000
Abel	24,000	Mira Novita	120,000
Herkulanus Sutomo Manna	48,000	Aco Bahri	120,000
Dominggus Uyub	48,000	Muhammad Rabata	48,000
Thomas Edison	120,000	Athis S.Sos	48,000
Syahrudin	120,000	Septa Setiawan	120,000
Sangkai	48,000	Sardi Razak	120,000
Nisil Tuman	72,000	Sri Sari	48,000
Cuang B Ringkan	48,000	Hasna	48,000
Alson Lubis	120,000	Abu	120,000
Noname	120,000	Parlindungan Tandigau	120,000
Rikit	24,000	Ansyurdin	120,000
Romba Marannu S	120,000	Ali	120,000
Boy Alexander Darakay	50,000	Kius Pitrius	120,000
Ade Purnawirawan	72,000	Sri Tiawati	120,000
Fahmi	48,000	Fainal Djibran	48,000
Markulah	96,000	Eldius N. Dju'u	48,000
Solihin	48,000	Saiduani	120,000
Jaro Wahid	48,000	Yossi Samban	120,000



Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Erni	120,000	Lusia	100,000
Sibuddin	120,000	Bata Manurun	100,000
Mariana	120,000	Hasna	100,000
Rudi	120,000	Diah Ayu Prastiwi	100,000
Neni	120,000	Herriana Harta	100,000
Wiwin	192,000	Albertus Sekeronej	100,000
Ameria Sinta	120,000	Afrida Erna Ngato	100,000
Asari Abdi	48,000	Sem Vani Ulimpa	100,000
Irwanto Tadeko S.Sos	48,000	Dorince Mehue	100,000
Thomas Edison	48,000	Denda Suriasari	100,000
Nurlin	48,000	Dedi Suhendi	24,000
Efendi Buhing	120,000	Arifin	24,000
Adi Purwadi	120,000	Rozian	50,000
Budin	48,000	Muhammad Iyad	24,000
Sunarlin	48,000	Najamudin	48,000
Himyulwahyudi	120,000	Luther Stanley Wahilaitwan	48,000
Pasalongan	120,000	Ferlin Tuluressy	48,000
Berantas SE. M Si	120,000	Daniel P. Amarduan	48,000
Paundanan Embong Bulan SH	120,000	Joice Sakleresi	48,000
Nico Andasputra	120,000	George M. Kdise	48,000
Stefanus Masiun	120,000	Nisyeh Nanaryain	48,000
Hardi P. Hady	48,000	Jefri Rang Lalin	48,000
Yusri Yusuf	120,000	Alson Lambiombir	48,000
Denik Poriali	120,000	Petrus Jerebulan	48,000
Muhammad Salman	240,000	Petrus Tutuboy	48,000
Taufik Haderani	288,000	Martha Magdalena Patty	288,000
M. Abran Gumilang	216,000	Indah Pratiwi	120,000
Jemianto Maliko	48,000	Petranes Lawalata	312,000
Kadi Sahada	336,000	Heri Susanto Sadiq	24,000
Helena Patanduk	24,000	Komalodin Adi Saputra	24,000
Novenia Ambeua	24,000	Ansori	24,000
Arsyad Arifin	24,000	Ismail	24,000
Dedi Suhendra	24,000	Koko Hadiwana	24,000
Fransiskus Xaverius Sura	24,000	Hamdi	24,000
Noval Apek Saputra	72,000	Vinsensius Vermy	100,000
Riama Simamora	100,000	Konomi Suprianus	100,000
Stefanus Masiun	100,000	Boni Pasius	100,000



Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Abikusno	100,000	Anggi Januarti	24,000
Elia Rosita	100,000	Wanji Darma Permana	24,000
Dedan	100,000	Andre Tandigau	24,000
Martinus Aki	100,000	Ruby	48,000
Rozian	24,000	Sri Wardah	48,000
Vopy Pulay	24,000	Yulius Tanang	48,000
Rengki Delfika	24,000	Mairaji	48,000
Riski Prandana	25,000	Mathyus Porwanto	48,000
Leo Waldi	25,000	Deskiani Maranata	48,000
Risman Hadi	25,000	M.Hamidi	48,000
Sepriadi	25,000	Aji Sukmo	24,000
Misran	25,000	Kaharuddin	96,000
Boy Darakay	24,000	Muhamad Ihsan	24,000
Agustina Palaler	24,000	Muhammad Hatta	24,000
Fanny Darakay	24,000	Hayatul Azmi	24,000
Erlina Darakay	24,000	Firdaus	24,000
Said Arloy	24,000	Albuzar	24,000
Fajaria Arloy	24,000	Ahyar	24,000
Marpens Seltit	24,000	Susanto	24,000
Dominggus Djolem	24,000	Saipul Bahri	24,000
Alhidayat	24,000	Irdiansyah	24,000
Afriansyah	100,000	Roni Pasla	24,000
Muhammad Fauzan	24,000	Fahrizal	24,000
Hardiansyah	24,000	Zulmukim Alam	24,000
Sepriadi	24,000	Sukandi	24,000
Maximilianus Herson Loi	250,000	Khozzin	24,000
Karya M.	120,000	Haidar	24,000
Maspakel Dane Rahil	24,000	Oktaviandi	24,000
L. Abd. Gafar	24,000	Nespu	16,000
L. Saparudin Aldi	24,000	Lili Mustari Palondongan	240,000
Nuruddin	24,000	Nia Ramadhani	96,000
Sayadi	24,000	Kano	120,000
Rohadi Saputra Jaya	24,000	Hendy Irawan	72,000
Ardianto Hidayat	24,000	Elwin	72,000
Suhirman	24,000	Ros Siana	72,000
M. Zaenudin	24,000	Sudarli	120,000
Pauzan	24,000	Parwanto	30,000



Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Busung Umbuk	72,000	Agustinus Brayen Oreal Depaba	24,000
Paranto Lisu Padang	50,000	Muliadi	120,000
Karuhei	24,000	Sudirman Tajang	24,000
Marsido	24,000	Lili Mustari	24,000
Rushayati	100,000	Darmiatai	24,000
Gabriella Maharani Ruga	120,000	Burhanuddin	24,000
Zebulon Dedy	120,000	Ali	24,000
Sulei Medan	48,000	Herman Saleh	24,000
Yester Danual	24,000	Fatmawati Lody	24,000
Bambang Kenan	24,000	Nur Zakiah	24,000
Nopita Natalia	24,000	Nia Ramadani	24,000
Oleny Suadi	48,000	Baktiar	24,000
Altae	24,000	Jaisa	24,000
Wiwin Herayani	24,000	Putri Afiyati	24,000
Debora Rambu Kasuatu	24,000	Dida	24,000
Tanda E.M.M. Suruk	24,000	Darwin	24,000
Grasiana T. Desi	24,000	Rerung	24,000
Sindi Yohana	24,000	Muhasbar	24,000
Lestari Rambu Boba	24,000	Aji Santoso	24,000
Marice Suruk	24,000	Dedi Setiawan	24,000
Nurmala	48,000	Hamsir Spd, M, pd	24,000
Elisabet Satrian Alamako	24,000	Hasriani, SKm	24,000
Simon Sedu Welan	120,000	Wahyu	24,000
Ihwal	120,000	Keisiadi	24,000
Nofri Vikrea Kistovan	96,000	Lalu Mohamad Iswadi Athar	24,000
Lalu Kusuma Jayadi	24,000	Paulus Kadok	170,000
Darsen Saputra	96,000	Lusia	120,000
Yanda Elison M.M Suruk	96,000	Priska	120,000
Bobpi Kaliyono	120,000	Darius Saiman	120,000
Darmansah	96,000		
		<b>TOTAL</b>	<b>67.226,000</b>



**Laporan Iuran Kader Masyarakat Adat  
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**  
**Januari - Desember 2024**

Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Danil Banai	120,000	Karuhei	24,000
Angga	120,000	Hermanus Jemidi	24.000
Emina Susanti	120,000	Novita Natalia	50.000
Mulan Miri	120,000	Mahmudi	120.000
Asnani	24,000	Arifin Saleh	50.000
Lewaran Rantela'bi	144,000	Taufik Haderani	120.000
Y.S. Tandirerung	144,000	Pitrus	72.000
Saba' Sombolingga	144,000	Dian Utami	72.000
Marthina Palayukan	144,000	Sarianto	48.000
Maksi Balalembang	144,000	Pauluas Alfons (Danar)	24.000
Elwin	24,000	Sahadan	240.000
Saing T. Anggen	48,000	Irsal Hamid	240.000
Eba Setani	25,000	Besse Tiurma Pratiwi	120.000
Iskandar, S.Pd, MS.i	25,000	Sitodong Drs.H. Pahruddin Hasan	48.000
Simonsius	50,000	Iswan Fajar	48.000
Jojon	48,000	Hariani	120.000
Suhartono	120,000	Sultan Arsyad	48.000
Adiman Rantin	24,000	Helena	120.000
Nuriel Senjaya	24,000	Murniasih	24.000
Darawandi	25,000	Andiman	24.000
Erlianus	50,000	Karuna Mardiansyah	120.000
Theo Datus Tanto	50,000	Pordiamin Mungkur	120.000
Perdison	50,000	Darwin Mungkur	24.000
Hartono	25,000	Ali Akbar Meka	24.000
Konti Nopin	25,000	Poltak Meka	24.000
Sewantapuja	120,000	Harapan Meka	24.000
Badri H. Budung	30,000	Selamat Marbun	24.000
Andreas	25,000	Yusniar Tampubolon	24.000
Darwandi	25,000	Masdalifah Pasaribu	24.000
Samsi	30,000	Wiwin Herayani	24.000
Ipno indar	24,000	Ramli	24.000
Marsido	24,000	Arnisyah	24.000
Yester Danual	30,000	Rosa Pegy Alvisa	24.000
Denal.D.Pulang	50,000		



Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Susana Lawaq	120.000	Fahrul Amin	24.000
Sumiati	24.000	Zulkifli	24.000
Miliani	24.000	Irwan	24.000
Ratna	24.000	Muh. Danil	24.000
Arbaniah	24.000	Wiwi Amalia	24.000
Triawan Umbu Uli Mehakati	24.000	Irham	24.000
Misen	50.000	Iwan	24.000
Benediktha Nemi	120.000	Mahir	24.000
Fitri	120.000	Irwan	24.000
Rudi Ignatius	120.000	Muh. Danil	24.000
Petrus Baru	120.000	Suherman	24.000
Maring	48.000	Hasrullah	24.000
Andriyawan Hudang	120.000	Fadil	24.000
Muslim Andi Yusuf	48.000	Fauzan	24.000
Marlina Taba	48.000	Melda	24.000
M Fikram	24.000	Sumarni	24.000
Heri Lauri	24.000	Rahma Agusti Sari	24.000
Welem Lauri	24.000	Ratna	24.000
Burhanuddin	72.000	Nuraisyah	24.000
Erlina Darakay	25.000	Nashar	24.000
Ayaturahman	120.000	Muh. Mihfadli	24.000
Rio Julkiflin	120.000	Rahmayani	24.000
Solihin	24.000	Sumardi	24.000
Lalu Mohamad Iswadi Athar	24.000	Rismawati	24.000
Fajri	24.000	Awaluddin Syam	24.000
Fajar	24.000	Wahyudi	24.000
Agus	24.000	Muh. Agus	24.000
Jamaluddin	24.000	Muh. Arif	24.000
Aswar	24.000	Irwan	24.000
Nursaifullah	24.000	Danil	24.000
Muh. Ansar	24.000	Zurianto	24.000
Jabal Nur	24.000	Nining Rahmawati	24.000
Serli	24.000	Dodik Sutikno	24.000
Andis	24.000	Juniansah	24.000
Risal	24.000	Airman	24.000
Pardi	24.000	Nikrana	24.000
Risaldi	24.000	Renadi	24.000



Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Raden Dedi Setiawan	24.000	Noviana Ipi	24.000
Sinarto	24.000	Maria H.T	24.000
Anton Gustiawan Sumekah	24.000	Markus Sanggung	24.000
Ridho	24.000	Marselinus Adi	24.000
Awaludin	24.000	Yustinus Tahui	24.000
Kalam wadi	24.000	Teddy W.	24.000
Metawadi	24.000	Natalis Senggiang	24.000
Muliati	24.000	Modestus Bato'	24.000
Sahbandi	100.000	Noviana Wati Husun	24.000
Muhammad Hazmin	48.000	Aprilia Guhaan	24.000
Zul Atman	48.000	Lasah	24.000
Indra Mustika	24.000	Gerson	24.000
Azhar Bin Darwis	48.000	Daniel	24.000
Hadial Putra	24.000	Darius Doni	24.000
M Alvin	24.000	Yuita Hubung	24.000
Eri Deka Gustiar	24.000	Isidorus Gayuh P.	24.000
Do'i Saputra	24.000	Yuliana Lunyi	24.000
Iqbal Kaliparajo	24.000	Raimundus Lgo S.	24.000
Suheri	24.000	Elvirawati Pasila	216.000
Irayanti	24.000	Arni Theofilus	216.000
Rustum SB Rauf	24.000	Martinus Tandiongan	216.000
Padriawan	24.000	Nia Ramadani	24.000
Jasrul	24.000	Andik Nursan Parakkasi	24.000
M Fauzi	24.000	Mardiana	24.000
Tangkel	24.000	Metiyana	72.000
Mardani	24.000	Agus Hariyanto	24.000
Retiora	24.000	Hayatia Daud	120.000
Laila Kardani	24.000	Yosep	44.000
Josa Surya	24.000	Gusterendi	24.000
Iwan Kastiwan	60.000	Toyono	24.000
Dede Ridwan	60.000	Rosa'adah	24.000
Chiska	60.000	Raden Wirasatriaji	24.000
Simonsius	24.000	Parwanto	24.000
Mardani	120.000	Baiq Dian Yusniati	72.000
Suanto	24.000	Makrullah (Irul)	48.000
Anastasia Lemasung	24.000	Wiwin Indiarti	240.000
Hermas Rintik Maring	24.000	Venedio Nala Ardisa	144.000



Kader Masyarakat Adat	Iuran	Kader Masyarakat Adat	Iuran
Irma Agustin	72.000	Agus	24.000
Elza Zulandita	24.000	Agus Hardiawan	24.000
Slamet Ichlasul Amal	216.000	Alfitria	24.000
Akbar Wiyana	216.000	Anas Sopian Ismajaya	24.000
Shintia Juli Brachmawati	72.000	Andiyana	24.000
Slamet Diharjo	120.000	Arga Saputra	24.000
Masruri F Yudhistira	24.000	Ari Fadilah	24.000
Mujianto	144.000	Bais Muhajir	24.000
Dinda Anggun	144.000	Dafid Juli Fahrizal	24.000
Kalpison S.H	48.000	Dian Nurdiansyah	24.000
M Rabata	24.000	Dika Setiawan	24.000
Sri Handayani	24.000	Dwi Andini	24.000
Milodi	240.000	Egis Trianto	24.000
Irma Agustin	24.000	Firwanto	24.000
Jamaiah	24.000	Hilman Firdaus	24.000
Ira Itayani	24.000	Ilda Rahayu Jelita Putri	24.000
Ibrahim	144.000	Irvan Irawan	24.000
Pieter Lappy	24.000	Isep Aprianto	24.000
Pitra Lappy	24.000	Juan Febrian Yogapranata	24.000
Christy Mustamu	24.000	Lusi Rahmawati	24.000
Lisa Tamaela	24.000	Mela Puspitasari	24.000
Berthy Dobberd	24.000	Mulyana	24.000
Clif Kissya	24.000	Nani	24.000
Flesya Latuharhary	24.000	Nono Saputra	24.000
Ali Sangadji	24.000	Pepri Yana	24.000
Wahab Karepesina	24.000	Perdi Paku Gumelar	24.000
Jecky Lawalata	24.000	Reni Nurhidayani	24.000
Melky Wattimena	24.000	Riko Imam Maulana	24.000
Butje Sinay	24.000	Rinawati	24.000
Nyong Sinay	24.000	Rio Gustiana	24.000
Ansyeh Latumaelissa	24.000	Riska Fatmawati	24.000
Marwa	24.000	Robita Alihandra	24.000
Benito Kissya	24.000	Rosmawati	24.000
Eliza Kissya	24.000	Rusdianto	24.000
Aang Anggra Hariyana	24.000	Sany Cahya	24.000
Adrian	24.000	Saputra Baka Sasmita	24.000
Agit Firgiawan	24.000	Sarah Asari	24.000



Kader Masyarakat Adat	Iuran
Sifa Nurfauziah	24.000
Solahudin	24.000
Sucia Lisdamara Yulmanda Taufik	24.000
Susmita Afriyani	24.000
Sutrisno	24.000
Syahrul Prandicka	24.000
Yana Supyandi	24.000
Yudha Prasetyo	24.000
Yurismayanti	24.000
Wika Sutandi	24.000
<b>Total</b>	<b>11.277.219</b>

**Pemuda Adat Osing antusias mengikuti Pelatihan Kader Pemula.**  
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





**Laporan Iuran Kader Masyarakat Adat  
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Januari - Februari 2025**

Kader Masyarakat Adat	Iuran Kader	Kader Masyarakat Adat	Iuran Kader
Sindi Yohana	120.000	Nahadin	144.000
Jaisa	120.000	Yasman	48.000
Darmiati	120.000	Basarudin	48.000
Wilhelmina Sani	24.000	Mardan	48.000
Jhontoni Tarihoran	100.000	Selvi Herli Martina	48.000
Fahmi Arisandi	120.000	Zemi Sipantri	48.000
Eka Yuniar sih	120.000	Saprudin Soad	72.000
Efyon Junaidi	120.000	Kambu	72.000
Endang Setiawan	120.000	Eismin	72.000
M. Alfat H	120.000	Noval Apek Saputra	72.000
Ansori	120.000	Tono	144.000
Rumaja	24.000	Lorensius	144.000
Rendi Saputra	96.000	Tatang	144.000
Wenni	24.000	Yohana Y,B,M	144.000
Harry Siswoyo	144.000	Febrianus Kori	144.000
Anton	144.000	Dama Saputra Supin	144.000
Juyun	144.000	Agapitus	144.000
Pia Tulaini	144.000	Glorio Sanen	144.000
Pia Tulaini	144.000	Firenandus Lah	144.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.892.000</b>	



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA



### Waktunya Masyarakat Adat Mendapatkan Pengakuan & Perlindungan Hukum

Lebih dari 70 tahun, Masyarakat Adat di Indonesia telah berjuang untuk diakui hak-haknya secara resmi. Dengan adanya Undang- Undang Masyarakat Adat, kita punya kesempatan untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi Masyarakat Adat. Dukungan kita sangat dibutuhkan!

Tandatangani Petisi Dukungan Sahkan RUU Masyarakat Adat di [change.org](https://change.org/p/sahkan-ruu-masyarakat-adat) untuk mendesak Pemerintah & DPR RI agar segera mengesahkan Undang-undang Masyarakat Adat. Setiap tanda tangan berarti suara solidaritas untuk menjaga hak-hak Masyarakat Adat.

Scan QR code berikut untuk ikut mendukung perjuangan Masyarakat Adat! Suarakan dukunganmu sekarang!



<https://www.change.org/p/sahkan-ruu-masyarakat-adat>



## Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA): Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat

Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) adalah lembaga usaha yang dibentuk, didirikan, dan dimiliki secara mandiri oleh komunitas Masyarakat Adat. Tujuannya adalah mengelola berbagai aset serta potensi ekonomi yang terdapat di wilayah adat guna meningkatkan kesejahteraan komunitas.

BUMMA dan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) mengelola berbagai usaha produktif di sektor pangan lokal, kerajinan, hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan jasa lingkungan. Di tingkat daerah serta komunitas, BUMMA dan KUMA digerakkan oleh kader-kader Masyarakat Adat yang memiliki semangat untuk mengembangkan potensi ekonomi menjadi usaha berkelanjutan. Keberadaan BUMMA juga memperkuat jaringan pemasaran, meningkatkan kapasitas komunitas, serta menjaga stabilitas harga yang kerap dipermainkan oleh tengkulak.

BUMMA memiliki karakter khas dalam pengelolaannya, seperti kepemilikan kolektif oleh Masyarakat Adat, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, serta tata kelola berbasis gotong royong. Keuntungan yang diperoleh dialokasikan untuk pengelola BUMMA, kelembagaan adat, dan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat. Selain itu, BUMMA memastikan sistem produksi yang berkelanjutan dan pemasaran yang adil.

Keberadaan BUMMA diharapkan mampu menjadi solusi bagi penguatan ekonomi komunitas yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Informasi lebih lanjut mengenai BUMMA dapat menghubungi :

1. **Feri Nur Oktaviani**,  
No Telp. : 0813 2765 7138  
Email : feri.nur@aman.or.id
2. **Arifin "Monang" Saleh**,  
No Telp. : 0812 1833 4211  
Email : arisaleh@aman.or.id





**NUSANTARA**  
INDIGENOUS  
COFFEE



NIC mempersembahkan kopi-kopi dari para petani adat Nusantara bagi kamu pecinta kafein. Petani-petani smallholder ini tersebar di NTT, Sulsel, Bali, dan Bengkulu, dan akan menyuntikkan semangat dalam secangkir kopi di pagi dan sore harimu.

Kami menyediakan full-washed Arabica dan Robusta green bean, roasted bean, maupun ground coffee yang sesuai dengan kesukaanmu. Kami juga bekerja sama dengan kakak kandung Gerai Nusantara dalam menyediakan

- goodie bag untuk kebutuhan event kamu dengan sistem PO dan harga terjangkau. Jangan ragu menghubungi kami untuk info tentang paket-paket yang kami punya.

Untuk berbelanja dengan nyaman, silakan kunjungi laman marketplace dan Instagram kami untuk lineup kopi-kopi yang tersedia. Atau, kontak kami untuk menikmati cerita-cerita kopi di kedai kami di Gerai Nusantara Bogor.

Dukung terus produk Masyarakat Adat Nusantara ya!



**Genus**  
Coffee & Boutique



Jl. Raya Cifor No. 8,  
Situ Gede, Kota Bogor



@genuscoffeeboutique

## **WILAYAH ADAT ADALAH BENTENG KESELAMATAN BUMI DARI KRISIS IKLIM YANG MELANDA**



**N**usantara kita terdiri dari bermacam-macam suku yang tersebar di ribuan pulau, disana terdapat ribuan Komunitas Masyarakat Adat yang hidup dan menjaga Wilayah Adat sebagai ruang hidupnya, Masyarakat Adat masih menjalankan tradisi dan budaya yang telah diwariskan bergenerasi-generasi lamanya, secara lestari tanpa merusak bumi, planet kita satu-satunya, rumah kita semua.

Masyarakat Adat telah berperan penting dalam menjaga lestarinya bumi selama bermilenia lamanya, menjaga bumi terhindar dari berbagai bencana ekologi, terlebih saat bumi kita saat ini berada dalam krisis iklim parah akibat keserakahan korporasi & negara.

Wilayah adat bukan hanya ruang hidup bagi Masyarakat Adat tapi juga sebagai benteng pengaman keselamatan kehidupan di planet ini dari marabahaya yang timbul akibat krisis iklim yang melanda. selain itu wilayah adat juga adalah penghasil bahan pangan, obat-obatan, oksigen bagi kita semua, sekaligus rumah bagi ribuan spesies flora & fauna yang terancam punah.

Kita bisa memulai langkah kecil dengan mendukung Masyarakat Adat untuk terus melestarikan wilayah adatnya, baik itu hutan, bukit, gunung, sungai, hingga lautannya, agar krisis iklim yang kini melanda dapat kita lawan bersama.

Jadilah DerMA (Dermawan Masyarakat Adat) dengan berdonasi melalui :

**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA**  
**Bank MANDIRI KCP PEJATEN, JAKARTA**  
**Nomor Rekening : 127 - 000 - 657 - 090 - 5**

Terimakasih telah bersedia berdonasi dan mendukung Masyarakat Adat merawat dan menjaga wilayah adatnya, karena keselamatan Bumi ada ditangan kita semua.